

**DINAMIKA PENGELOLAAN PARIWISATA:  
ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KETERLIBATAN  
MASYARAKAT DESA BOMO, KECAMATAN PUNUNG, KABUPATEN  
PACITAN DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA GOA GONG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Brawijaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar *Sarjana Sosial***

**OLEH:**

**SONYA NIRWANA MAHARANI**

**NIM 125110806111001**

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2016**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini saya :

Nama : Sonya Nirwana Maharani

NIM : 125110806111001

Program Studi : Antropologi

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar karya saya, bukan merupakan jiplakan dari karya orang lain, dan belum pernah digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi manapun.
2. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang akan diberikan.

Malang, 15 Desember 2016



Sonya Nirwana Maharani  
NIM. 125110806111001

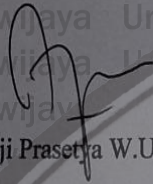


**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Sonya Nirwana Maharani telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Malang, 15 Desember 2016

Pembimbing



Aji Prasetya W.U., M.A

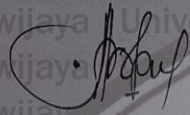
NIK 20160787 1030 1 001





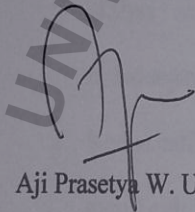
**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Sonya Nirwana Maharani telah disetujui oleh Dewan penguji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.



Siti Zurinani, M.A , Ketua Dewan Penguji

NIK. 201106 861107 2 001



Aji Prasetya W. U, M.A , Anggota Dewan Penguji

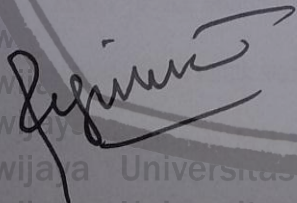
NIK 20160787 1030 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Antropologi

Menyetujui,

Pembantu Dekan I FIB



Dr. Hipolitus K. Kewuel, M. Hum

NIP. 19670803 200112 1 001



Syariful Muttaqin, M.A

NIP-19751101 200312 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Ridha yang telah diberikan Allah SWT dan shalawat beserta salam selalu dijunjung tinggi untuk Nabi Muhammad SAW. Selalu saya ucapkan *Alhamdulillah* karena Allah SWT yang selalu memberikan RahmatNya agar saya selalu ingat untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun halangan dan rintangan selalu ada di depan. Skripsi ini dapat selesai berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dengan sepenuh hati saya haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayah dan ibu. Keduanya selalu setia, kuat, tegar, dan memperhatikan saya selama ini. Khususnya di saat proses pengerjaan skripsi mereka yang selalu memberi doa, semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasehat yang sangat berarti.
2. Kedua adik saya Rhapsodya Sekar R K dan Ali Sudarman, yang selalu menyuruh saya segera lulus agar bisa kembali ke rumah dan yang selalu memberi semangat.
3. Bapak Aji Prasetya W. U, M.A dan Ibu Edlin Dahniar Al-Fath, M.A selaku dosen pembimbing yang telaten dan super sabar menghadapi saya ketika proses bimbingan. Terimakasih telah memberikan masukan yang sangat berarti untuk skripsi saya agar lebih enak untuk dibaca.
4. Ibu Siti Zurinani, M.A selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran pada skripsi ini. Terimakasih telah memberikan masukan yang cukup rinci sehingga saya dapat belajar untuk lebih detail lagi.
5. Segenap dosen di Program Studi Antropologi yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya selama ini.



6. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan dan khususnya UPTD Obyek Wisata *Goa Gong* yang telah memberikan saya ijin untuk melakukan penelitian di *Goa Gong*. Bapak Kepala UPTD

Obyek Wisata *Goa Gong* yang selalu bersedia memberikan informasi-informasi yang terkait dengan skripsi saya.

7. Masyarakat Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan yang sudah memberikan ijin kepada saya melakukan penelitian dan menerima saya selama proses pencarian data.

8. Khusus untuk Wisnu Fandy Pratama yang selalu setia membantu saya selama proses skripsi dan selalu menyemangati, mendoakan, menjadi tempat berkeluh kesah. Terimakasih untuk apa yang sudah diberikan kepada saya selama ini.

9. Keluarga Ibu Widya Retnaningsih, keluarga baru saya selama di Malang. Terimakasih Ibu, Pak Misdi, Mas Akbar, Mbak Diah, si krucil Azki yang selalu *gemesin*, Mas Nugroho, Mas Faris, Mas Oky, Najib, Rina, Buk Mis sudah menerima saya sebagai keluarga dan selalu memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi hingga sampai pada kelulusan saya.

10. Dua kakak di Malang yang setiap detik mengajak bercanda dan kita punya *geng* sendiri "*Geng Gemez*", Kak Rina dan Kak Nug. Terimakasih selalu menyemangati dan mensponsori cemilan tiap hari.

11. Teman saya sampai akhir hidup, Rina NH, Winda N, Krismala, Arini, Hesty TS, Rahmi Sedy. Terimakasih ya sudah mau saling menyemangati, yang selalu bersama kemana-kemana dan sementara harus terpisah.

Semoga kita dapat menjadi ibu yang super buat anak-anak kita kelak!

12. Teman “Pejuang S.Sos”, Alfiana, Chika, Uci, Dhino, Cici, Rina, Krisma,

Winda A, Nanda, dan Alfi yang selalu mendukung satu sama lain.

13. Teman kos N5 Rifky dan Puput, terimakasih sudah *ngomel-ngomel* agar saya tidak malas mengerjakan skripsi.

14. Teman-teman satu perjuangan Antropologi angkatan 2012 yang satu persatu sudah mulai berkarir, semangat ya!

15. Terimakasih kepada seluruh teman, sahabat, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu di sini, tetapi nama kalian akan selalu ada di dalam hati saya.

Semoga apa yang telah mereka berikan baik berupa materi dan tenaga mendapatkan balasan dari Allah SWT dan senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Saya selaku penulis merasa bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun supaya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Malang, 15 Desember 2016

Sonya Nirwana Maharani



## ABSTRAK

Maharani, Sonya Nirwana. 2016. **Dinamika Pengelolaan Pariwisata: Antara Kebijakan Pemerintah dan Keterlibatan Masyarakat Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan dalam Pengelolaan Obyek Wisata Goa Gong**. Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.

Pembimbing: Aji Prasetya W. U, M.A

Kata Kunci: Keterlibatan, Kebijakan Pemerintah, Masyarakat, Pengelolaan Obyek Wisata *Goa Gong*

Penelitian ini dilakukan di obyek wisata *Goa Gong* yang terletak pada Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. *Goa Gong* merupakan salah satu obyek wisata yang perkembangannya sangat baik di Kabupaten Pacitan, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dan keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam pengelolaan obyek wisata *Goa Gong*. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua rumusan yaitu, *pertama*: bagaimana pengelolaan obyek wisata *Goa Gong*, dan *kedua*: sejauh mana keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam pengelolaan obyek wisata *Goa Gong*.

Penelitian ini bersifat kualitatif, berdasarkan dari sifat penelitiannya maka bertujuan untuk mengungkap fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat. Penelitian ini menjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki, dan memahami fenomena sosial yang ada di daerah obyek wisata *Goa Gong* dan Desa Bomo. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, kajian literatur dan dokumentasi. Sementara itu, pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowbal sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Goa Gong* dulu ditemukan kemudian dijadikan sebagai obyek wisata dan dikelola oleh masyarakat Desa Bomo. Kemudian pengelolaan diserahkan kepada pemerintah daerah hingga saat ini dengan menggunakan sistem sewa karena gua tersebut milik perseorangan. Dalam pengelolaan khususnya struktur kepengurusan gua, pemerintah daerah tidak melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan mulai dari tahap perencanaan, implementasi dan pengawasan. Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan mutlak di tangan pemerintah daerah dan masyarakat tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pengelolaan gua. Masyarakat hanya terlibat secara informal saja yaitu terlibat di dalam kawasan *Goa Gong* untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti berdagang dan menawarkan jasa.



## ABSTRACT

Maharani, Sonya Nirwana. 2016. **The Dynamics of Tourism Management: Between The Government Policy And Community Involvement Of Bomo Village, Punung, Pacitan In The Goa Gong Tourism Management.** Anthropology, Faculty of Culture Studies, Brawijaya University.

Supervisor: Aji Prasetya W. U, M.A

Key Word: *Goa Gong* Tourism Management, Government Policy, Involvement, Society

This research was conducted in *Goa Gong* tourist attraction, that located in Bomo village, Punung districts, Pacitan. *Goa Gong* is one of the tourism destination that it has good development in Pacitan, thus potentially management and Bomo village community involvement in the management of *Goa Gong* tourism. The problem of the study are how to manage *Goa Gong* tourism and how far the Bomo village community involvement in the management of *Goa Gong* tourism.

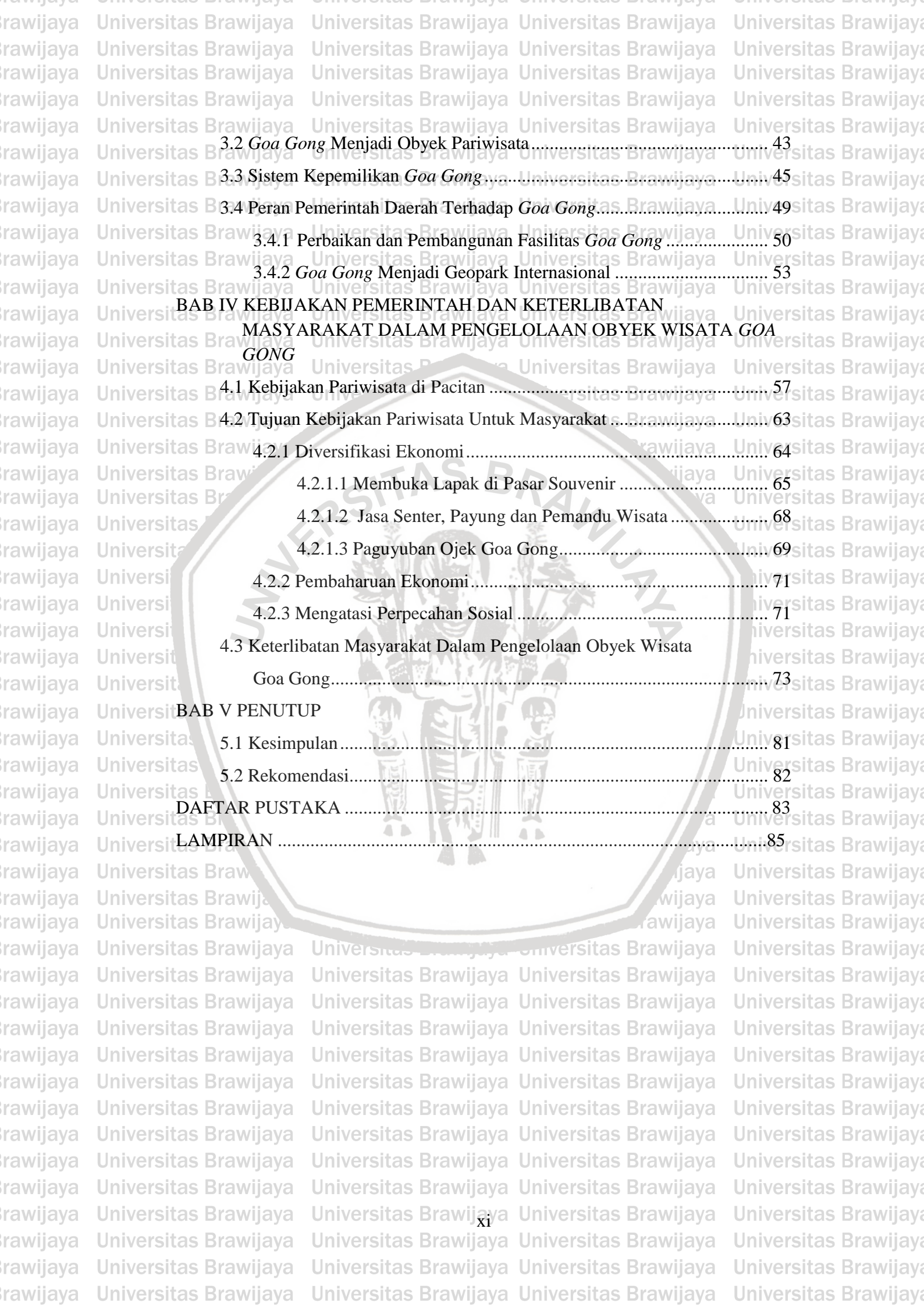
This research is qualitative study, that based on the nature of the research, it aims to reveal the social phenomena that exist in society. This study explained, described, investigated and understanding of social phenomena that exist in the area attractions of *Goa Gong* and Bomo village. This study used participatory observation, interview and documentation as the data collection. The informants selection in this study used the snowball sampling technique.

The findings reveal that *Goa Gong* first discovered and then used as a tourist attraction and is managed by the village communities Bomo. Then, the management handed over to local government is currently using a rental system because the cave private property. In the management structure of the cave, the local government did not involve the public to participate in the management starting from planning, implementation and monitoring. Policies related to absolute management in the hands of local government and the community has no right to interfere in the management of the cave. The community have been only involved on an informal basis, that is engaged in the area of *Goa Gong* to conduct economic activities such as trade and offer services.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Kajian Pustaka dan Kerangka Teori.....	5
1.4.1 Kajian Pustaka.....	5
1.4.1 Kerangka Teori.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	20
1.5.1 Pemilihan Lokasi Penelitian.....	21
1.5.2 Pemilihan Informan.....	21
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.5.4 Analisis Data.....	26
1.6 Sistematika Penyusunan.....	27
<b>BAB II SETTING WILAYAH, BUDAYA, DAN KEMASYARAKATAN</b>	
2.1 Letak Geografis.....	30
2.2 Demografi dan Pendidikan.....	33
2.3 Keagamaan.....	36
2.4 Mata Pencarian.....	37
<b>BAB III PENGELOLAAN OBYEK WISATA GOA GONG</b>	
3.1 Mitos dan Penemuan <i>Goa Gong</i> .....	40





3.2 Goa Gong Menjadi Obyek Pariwisata.....	43
3.3 Sistem Kepemilikan Goa Gong.....	45
3.4 Peran Pemerintah Daerah Terhadap Goa Gong.....	49
3.4.1 Perbaikan dan Pembangunan Fasilitas Goa Gong.....	50
3.4.2 Goa Gong Menjadi Geopark Internasional.....	53

**BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KETERLIBATAN  
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA GOA  
GONG**

4.1 Kebijakan Pariwisata di Pacitan.....	57
4.2 Tujuan Kebijakan Pariwisata Untuk Masyarakat.....	63
4.2.1 Diversifikasi Ekonomi.....	64
4.2.1.1 Membuka Lapak di Pasar Souvenir.....	65
4.2.1.2 Jasa Senter, Payung dan Pemandu Wisata.....	68
4.2.1.3 Paguyuban Ojek Goa Gong.....	69
4.2.2 Pembaharuan Ekonomi.....	71
4.2.3 Mengatasi Perpecahan Sosial.....	71
4.3 Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Goa Gong.....	73

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Rekomendasi.....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	83
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	85
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian..... 23

Tabel 2.1 Data Usia Penduduk Desa Bomo..... 33

Tabel 2.2 Data Pendidikan Masyarakat Desa Bomo..... 34

Tabel 3.1 Data Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Obyek Wisata *Goa Gong*... 52





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir ..... 13

Gambar 2.1 Peta Desa Bomo ..... 30

Gambar 3.1 Bagian Dalam *Goa Gong* ..... 44

Gambar 3.2 (a) Akses Jalan *Goa Gong* ..... 52

                  (b) Pasar Souvenir ..... 52

Gambar 3.3 (a) *Rest Area Goa Gong* ..... 52

                  (b) Jembatan Menuju Gua ..... 52



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan diakui bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap perolehan devisa serta penciptaan lapangan kerja secara luas cukup signifikan.

Bentuk perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan pemerataan pembangunan merupakan sumbangan dari pariwisata yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah (Damanik, 2013: 4). Tidak heran jika pariwisata disebut sebagai salah satu sektor yang memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat mendapatkan manfaat dari pariwisata yang dapat mengubah kehidupan mereka.

Selain itu, pariwisata tidak hanya memberikan dampak kepada masyarakat saja, tetapi pemerintah atau negara juga mendapatkan dampak tersebut. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil dari adanya pariwisata untuk mengembangkan program-program kesejahteraan masyarakat atau dapat dikatakan mengentaskan kehidupan masyarakat miskin.

Menurut Damanik, menjadi tantangan besar dan agenda pekerjaan yang tidak mudah bagi para perencana pembangunan untuk melakukan parameter kesejahteraan yang diperoleh dari pariwisata, karena konsep kesejahteraan yang sangat kompleks dan pariwisata yang memiliki banyak unsur sehingga melibatkan banyak pihak (Damanik, 2013: 5-6). Meskipun hal tersebut tidak mudah, akan



tetapi langkah-langkah tersebut harus dilakukan demi tujuan awal tadi yaitu kesejahteraan dengan kerjasama yang erat dan konsisten, karena semua pihak yakin bahwa pariwisata dapat bertahan jika dampaknya pada peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kawasan wisata tersebut.

Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang terletak di pantai selatan pulau Jawa yang memiliki karakteristik wilayah perbukitan dan merupakan kawasan karst. Kawasan karst atau kawasan kapur adalah bentanglahan yang didominasi oleh proses pelarutan batuan dimana terdapat interaksi yang unik antara batuan yang mudah larut, karbondioksida dari atmosfer dan air (Sudarmadji, dkk, 2013: iii). Kabupaten Pacitan juga merupakan salah satu kabupaten yang memiliki daya tarik wisata alam seperti gua dan pantai. Dalam hal ini, sektor pariwisata di Pacitan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan dan menjadi sektor yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti penjelasan dari legislator Partai Demokrat bahwa, pariwisata bukan hanya soal peningkatan kunjungan, promosi, bisnis hotel dan penginapan, tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana pariwisata ini dapat menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat (pacitanku.com).

Kabupaten Pacitan sendiri disebut sebagai “Kota 1001 Goa”, hal ini dikarenakan banyaknya gua seperti *Goa Gong*, *Goa Tabuhan*, *Goa Song Terus*, *Goa Kalak*, *Goa Putri*, *Goa Luweng Jaran*, dan *Goa Sukomono*. *Goa Gong* merupakan salah satu obyek wisata gua di Pacitan yang memiliki keindahan alam. *Goa Gong* ini terletak di Dusun Pule, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten

Pacitan dan terletak ± 30 km dari pusat kota Pacitan. *Goa Gong* di sini terkenal

akan keindahan stalagtit dan stalagmitnya yang mampu menaklukkan setiap mata wisatawan yang datang. Obyek wisata *Goa Gong* dapat dikatakan berhasil dalam menarik wisatawan untuk datang mengunjunginya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Disbudparpora Kabupaten Pacitan, menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah kunjungan *Goa Gong* mengalami peningkatan, sehingga tidak heran jika wisata ini menjadi sumber pendapatan daerah (Disbudparpora Pacitan, 2015).

Perkembangan *Goa Gong* dalam mendapatkan pendapatan selalu meningkat setiap tahunnya, secara tidak langsung hasil dari pariwisata ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan program-program kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai cara untuk dapat mewujudkan suatu pariwisata ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kawasan obyek wisata. Kerjasama dengan pihak luar juga dapat mendukung pengembangan suatu obyek wisata agar menjadi lebih baik lagi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut harus didukung oleh partisipasi masyarakat lokal, baik yang bersifat gagasan maupun finansial, supaya pengembangan pariwisata dapat berfungsi sebagai impuls bagi perbaikan taraf hidup mereka (Damanik, 2013: 8). Pelibatan masyarakat merupakan hal yang penting untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan melalui pengembangan pariwisata, karena hanya dengan keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pembagian hasil maka mereka bisa mendapatkan manfaat dari pengembangan pariwisata (Damanik, 2013: 9).

Obyek wisata *Goa Gong* terletak di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Bomo. Melihat hal tersebut, besar kemungkinan



masyarakat terlibat dalam pengelolaan, mengingat bahwa *Goa Gong* pada tahun 1995 ditemukan oleh masyarakat Desa Bomo dan tahun 1996 dijadikan sebagai obyek wisata oleh mereka. Pengelolaan *Goa Gong* dulu dilakukan oleh masyarakat Desa Bomo dan berhasil mendatangkan wisatawan untuk mengunjunginya. Setelah kurang lebih 1 tahun obyek wisata *Goa Gong* ini berjalan, kemudian kegiatan pengelolaan *Goa Gong* berpindah ke tangan pemerintah daerah. Hal itu dilakukan agar obyek wisata *Goa Gong* ini nanti dapat berkembang lebih baik lagi.

Dalam pengelolaan pariwisata biasanya melibatkan masyarakat yang berada di kawasan pariwisata, karena secara tidak langsung masyarakat lebih memahami situasi atau keadaan di lingkungan mereka. Seperti pada beberapa obyek wisata di Pacitan yang pengelolaannya melibatkan masyarakat, yaitu Pantai *Banyu Tibo*, Pantai *Pidakan*, *Goa Dawung*, dan *Goa Putri*. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada obyek wisata *Goa Gong*, dimana tidak semua masyarakat Desa Bomo terlibat aktif dalam pengelolaan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pengelolaan memang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah daerah, tetapi dalam kegiatan kepariwisataan tersebut masih terlihat bahwa masyarakat Desa Bomo aktif dalam kegiatan di kawasan *Goa Gong*, sedangkan pemerintah daerah menyatakan bahwa pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan *Goa Gong*. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin menggali informasi yang mendalam mengenai bagaimana pengelolaan obyek wisata *Goa Gong* dan sejauh mana keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam pengelolaan tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan obyek wisata *Goa Gong*?
2. Sejauh mana keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam pengelolaan obyek wisata *Goa Gong*?

## 1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai pengelolaan *Goa Gong* dan mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam pengelolaan obyek wisata *Goa Gong*, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca yang ingin mengetahui manfaat pariwisata pada suatu masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menambah tulisan ilmiah mengenai pariwisata dalam sudut pandang antropologi. Selain itu juga penulis berharap penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan agar obyek pariwisata *Goa Gong* dapat menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi daerah dan masyarakat lokal.

## 1.4 Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

### 1.4.1 Kajian Pustaka

Wisata *Goa Gong* ini merupakan salah satu wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Pacitan, akan tetapi wisata *Goa Gong* ini sangat sedikit digunakan dalam kajian penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran literatur, hanya ditemukan kajian atau penelitian terhadap wisata *Goa Gong* dengan judul *Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata Goa Gong di Kabupaten Pacitan* yang dilakukan oleh Nendras Kasmaningrum (2008) dari Universitas Sebelas Maret. Dalam kajian



tersebut membahas cara untuk meningkatkan pendapatan dan jumlah pengunjung yang dilakukan oleh pengelola wisata *Goa Gong*. Pada waktu itu, pengelolaan wisata *Goa Gong* belum dilakukan secara optimal dan kurangnya kerjasama dengan investor-investor yang akhirnya hal tersebut menjadi masalah pokok dalam pengembangan wisata *Goa Gong*, sehingga kajian tersebut memberikan masukan yang relevan dengan permasalahan yang ada.

Kajian tersebut menjelaskan bahwa hal yang dibutuhkan dalam pengembangan potensi wisata *Goa Gong* ini terletak di berbagai bidang antara lain, sarana dan prasarana, promosi dan publikasi, upaya pengamanan, dan kerjasama antara pengelola dengan pemerintah daerah. Sebenarnya penelitian tersebut memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan potensi wisata *Goa Gong*, mengingat bahwa potensi yang dimiliki oleh wisata *Goa Gong* sebenarnya sangat besar dan berhasil menjadi daerah tujuan wisata karena adanya beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: pertama, atraksi yaitu keadaan suatu tempat dengan iklim yang baik serta pemandangan yang indah di sepanjang jalan menuju obyek wisata *Goa Gong*. Kedua, aksesibilitas yang merupakan tempat tujuan dengan jarak dekat maupun jauh, serta ketersediaannya alat transportasi ke tempat tujuan. Ketiga, amenitas yang merupakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di daerah tujuan wisata. Keempat, aktivitas yang merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan. Apabila pengembangan obyek dan daya tarik wisata *Goa Gong* ini dilaksanakan secara optimal dan dikelola dengan maksimal, maka wisata *Goa Gong* semakin diminati oleh berbagai kalangan.

Setelah membaca kajian yang ditulis oleh Nendras Kasmaningrum (2008), menjadikan penulis untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai obyek wisata

*Goa Gong* ini dengan fokus yang berbeda. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kajian tersebut hanya membahas mengenai cara pengembangan *Goa Gong* untuk meningkatkan pengunjung dan pendapatan. Perbedaan kajian tersebut dengan kajian yang penulis teliti adalah penulis akan membahas mengenai pengelolaan *Goa Gong* pada saat dikelola oleh masyarakat hingga pengelolaan berpindah ke tangan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, penulis juga akan membahas mengenai keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam pengelolaan obyek pariwisata *Goa Gong*, yang dilihat dari dua perspektif yaitu pemerintah daerah dan masyarakat Desa Bomo, mengingat bahwa *Goa Gong* ini berada di kawasan tempat tinggal penduduk pedesaan dan selain itu juga dulunya obyek wisata ini dikelola oleh masyarakat Desa Bomo.

Kajian pariwisata yang ditulis oleh Dewa Putu Oka Prasiasta (2011) berjudul *Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat di Desa Wisata* membahas mengenai keterpinggiran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang berupa desa wisata yang terjadi di Desa Wisata Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dalam tulisan ini mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata di daerah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang ada di sekitar obyek pariwisata secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, akan tetapi pengembangan pariwisata yang ada di Desa Jatiluwih ini berjalan jauh dari harapan masyarakat sekitar. Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam pengembangan pariwisata, pengelolaan desa wisata sepenuhnya didominasi oleh pemerintah. Secara tidak langsung, ketidakterlibatan masyarakat ini menimbulkan konflik di antara pemangku kepentingan.



Menurut konsep dasar pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dituntut adanya partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai tahap pembangunan desa wisata, tetapi penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur pengelolaan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat. Dalam struktur organisasi tersebut masih dijumpai unsur-unsur pemerintah, baik sebagai pelindung maupun pembina, yang berarti adanya unsur pemerintah sebagai pengelola utama Desa Wisata Jatiluwih dapat memperkuat kekuasaan yang dimilikinya. Hal tersebut dapat melemahkan masyarakat seperti, masyarakat tidak memiliki pengalaman maupun keahlian dalam pengelolaan desa wisata.

Kajian tersebut juga tidak hanya melihat dari sisi pengelolaannya saja, akan tetapi juga melihat mengenai masuknya unsur pemerintahan yang berdampak pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan retribusi masuk ke Desa Wisata Jatiluwih. Unsur pemerintahan dalam hal ini adalah Kepala Desa Jatiluwih yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menjadikan adanya ketidakpercayaan terhadap masyarakat setempat dan sebagai bentuk hegemoni terhadap keterlibatan masyarakat pada pengelolaan retribusi masuk desa wisata. Dengan adanya hegemoni tersebut, menjadikan masyarakat melakukan “manuver” berupa keinginan untuk mengelola retribusi masuk ke Desa Wisata Jatiluwih, sedangkan pemerintah juga berkeinginan untuk mengelola retribusi masuk tersebut. Adanya keinginan yang sama dari kedua belah pihak menyebabkan terjadinya perang posisi.

Permasalahan dalam kajian tersebut memang terdapat kesamaan dengan apa yang penulis teliti yaitu mengenai ketidakterlibatan masyarakat dalam pengelolaan obyek pariwisata, tetapi konteksnya berbeda antara di Desa Wisata

Jatiluwih dengan obyek wisata *Goa Gong*. Selain itu tahapan program pengelolaan yang ada di Desa Wisata Jatiluwih sudah lebih maju bahkan sudah sampai pada titik konflik, sedangkan program pengelolaan di obyek wisata *Goa Gong* masih tahap awal, sehingga belum muncul konflik yang terlalu tinggi.

Selain itu ada kemungkinan bahwa di *Goa Gong* memiliki mekanisme yang berbeda untuk menekan terjadinya konflik. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik, karena sudah diketahui resiko-resiko tersebut.

Kajian yang ditulis oleh Kaspary dan Araujo (2013) berjudul *Local Responses to Tourism Development on the North-Eastern Coast of Brazil: the Case of the Municipality of Maragogi in Alagoas State* membahas mengenai respon masyarakat lokal terhadap praktik pengembangan pariwisata yang ada di beberapa daerah yaitu di Sao Bento, Kota Maragogi, dan Barra Grande. Dalam permasalahan di daerah Sao Bento menunjukkan bahwa masyarakat dimarjinalkan oleh pengusaha-pengusaha besar, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat kuasa di sana. Bentuk kuasa tersebut adalah keinginan pengusaha untuk membeli tanah milik masyarakat yang nantinya akan dijadikan sebagai pengembangan pariwisata. Meskipun masyarakat telah dimarjinalkan, akan tetapi masyarakat di sana mampu dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memanfaatkan pengembangan pariwisata tersebut. Mereka menjual ikan hasil dari tangkapan mereka, kerang, dan biskuit tradisional yang telah mereka buat kepada wisatawan meskipun faktanya bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki tanah untuk mereka tinggali.



Selain itu terdapat pula daerah yang sangat merespon baik adanya pengembangan pariwisata di sana, yaitu di pusat administrasi kota Maragogi.

Dengan adanya pengembangan pariwisata tersebut menyebabkan dampak penting dalam kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat tidak perlu menjual rumah-rumah mereka maupun menjual lahan mereka, bahkan mereka mampu berinvestasi berupa hotel kecil, bar, restoran, dan jasa lainnya, sehingga hasil dari semua itu mereka mengalami perbaikan signifikan dalam kualitas hidup mereka. Kemudian permasalahan yang ada di daerah Barra Grande, masyarakat setempat tidak merasakan peluang atau keuntungan adanya pengembangan pariwisata. Masyarakat terjebak dalam strategi pengembangan lahan yang dirancang oleh pihak luar yang memiliki kekuatan untuk menggusur masyarakat dari rumah mereka yang terletak di dekat laut. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat di sana akhirnya tinggal di daerah yang dapat merusak kesehatan, sehingga pengembangan pariwisata tidak memiliki manfaat bagi mereka.

Dari hasil kajian diatas terdapat perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti yaitu konteksnya berbeda. Kajian tersebut membahas permasalahan pada 3 daerah dengan masalah yang berbeda setiap daerahnya. Sedangkan penulis lebih spesifik, lebih fokus pada satu isu saja yaitu permasalahan yang ada di *Goa Gong* mengenai keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan obyek wisata, sehingga nantinya diharapkan mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

Jurnal Ahmad Nawawi (2013) yang berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis* yang fokus pada permasalahan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Depok. Dalam jurnal tersebut, Nawawi menjelaskan bahwa Pantai Depok

memiliki atraksi wisata selain keindahan pantai seperti wisata kuliner, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), kolam renang, permainan ATV, motor Jeep dan permainan layang-layang. Keberagaman atraksi wisata itu telah memberikan konsekuensi pada pengelolanya yang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah setempat, tetapi juga pada pihak yang paling dekat dengan Wisata Pantai Depok yaitu masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dianggap memiliki peran penting karena mereka langsung berada di lokasi wisata setiap saat dengan dinamika yang ada di kawasan tersebut. Menurut Nawawi (2013), partisipasi masyarakat menjadi kunci utama pengelolaan suatu wisata khususnya di Pantai Depok.

Selanjutnya, Nawawi (2013) menjelaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Pantai Depok telah mendirikan Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Pantai Depok. Hal tersebut adalah wadah organisasi masyarakat yang ada di pesisir Pantai Depok yang dibentuk sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata di Pantai Depok. Jadi, semua aktivitas yang berada di kawasan Pantai Depok dibawah kendali Koperasi Wisata Mina Bahari 45.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wisata pantai Depok masih disatukan dengan kawasan pariwisata lain yang ada di Parangtritis oleh Pemda Kabupaten Bantul. Meskipun demikian, dalam pengelolanya tidak hanya sebatas dari peran pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Pantai Depok dibuktikan dengan mendirikan suatu wadah organisasi yaitu Koperasi Wisata Mina Bahari 45. Masyarakat yang bergabung dengan organisasi tersebut adalah masyarakat yang berada di sekitar Pantai Depok. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Pantai



Depok terlihat jelas pada setiap harinya seperti berdagang, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat lah yang berpartisipasi dan bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap keamanan wisata Pantai Depok.

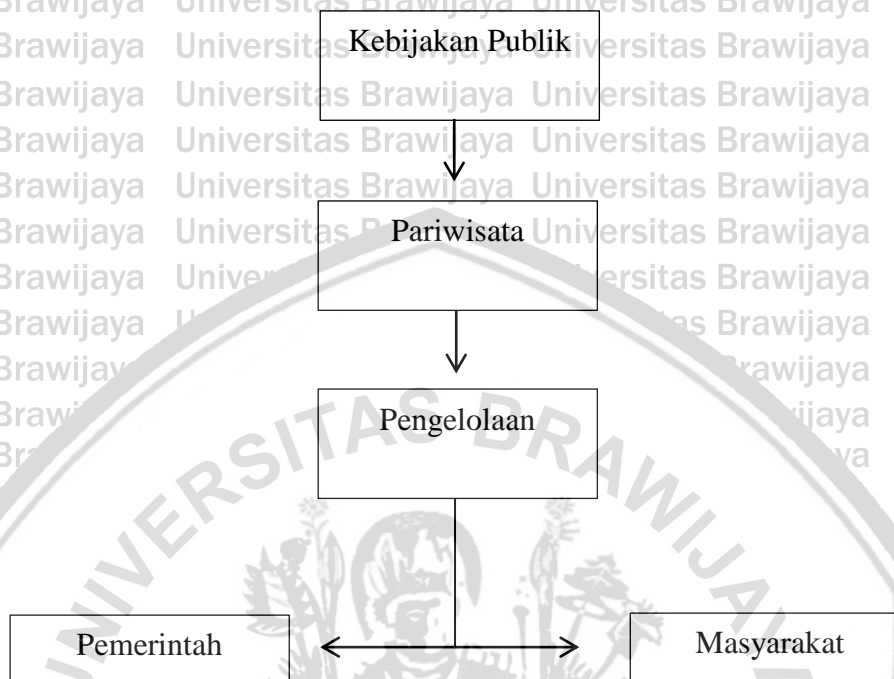
Pada intinya, pengelolaan Pantai Depok dilakukan secara kerjasama, dimana masyarakat sebagai pemegang peran penting yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keamanannya, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator serta kontrol terhadap pengembangan pariwisata.

Relevansi penelitian ini terdapat pada kajian mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Dalam penelitian ini, masyarakat sebagai bagian penting yang dilibatkan sebagai salah satu yang ikut berperan serta dalam pengelolaan wisata Pantai Depok. Meskipun obyek pariwisata tersebut juga dikelola oleh lembaga pemerintahan daerah, tetapi masyarakat setempat memiliki kesempatan yang besar dalam mengelola obyek wisata tersebut. Namun, perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan dalam struktur organisasi, sehingga masyarakat tidak terlalu terlibat dalam pengelolannya. Selain itu juga keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam obyek wisata *Goa Gong* hanya secara informal saja yaitu berdagang dan menawarkan jasa di kawasan obyek wisata.

#### **1.4.1 Kerangka Teori**

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya kerangka teori agar penelitian ini memiliki dasar yang kuat. Penelitian ini menggunakan konsep yang akan dijadikan acuan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai sejauh mana keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam pengelolaan

obyek wisata *Goa Gong*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kebijakan publik sebagai proyeksi permasalahan yang ada di wisata *Goa Gong*.



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

Menurut (Goerge, dkk, 2009: 199) kebijakan adalah rencana aksi untuk memandu atau mempengaruhi tindakan dalam mengambil keputusan. Suatu kebijakan berlaku pada individu, kelompok, swasta dan organisasi sektor publik.

Birkland menunjukkan elemen umum arti dari kebijakan publik, yaitu suatu kebijakan dibuat dalam nama publik, diprakarsai oleh pemerintah, dilaksanakan oleh aktor publik dan swasta, bermaksud untuk melakukannya atau tidak melakukan (Goerge, dkk, 2009: 199-200). Selanjutnya menurut (Suharto, 2008:

82), kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan, kerangka kerja, petunjuk, rencana, peta atau strategi, yang dirancang untuk menerjemahkan visi atau tujuan lembaga pemerintah dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu



di bidang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial menyangkut orang banyak, sehingga kebijakan sosial diindentikan dengan kebijakan publik.

Aktivitas kepariwisataan terkait dengan eksistensi kehidupan bersama masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya harus berhubungan dengan kepentingan publik. Menurut (Priyono, 2004: 122) dalam (Damanik, 2005), bentuk kebijakan yang tepat untuk membahas antara pariwisata dengan masyarakat adalah kebijakan publik, yang hal tersebut pastinya dikelola oleh negara, khususnya pemerintah. Pemerintah memfasilitasi pariwisata dengan adanya penyediaan layanan dan pengawasan untuk menjamin bahwa kegiatan pariwisata tersebut memenuhi standar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Elliot, 1997: 2).

Agar kegiatan kepariwisataan berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu kebijakan berbentuk peraturan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaannya. Bentuk peraturan tersebut dibuat berdasarkan kewenangan pemerintah yang tentunya memiliki fungsi dan tujuan. Dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah Kabupaten Pacitan mengacu pada kebijakan yang telah dibuat oleh negara yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagai dasar hukum pengembangan pariwisata. Obyek wisata *Goa Gong* merupakan salah satu obyek wisata yang berada di Kabupaten Pacitan yang mana obyek wisata ini dikelola dibawah naungan lembaga pemerintah daerah yaitu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Pengelolaan obyek wisata ini dijalankan atau dilakukan sesuai dengan adanya kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah daerah. Selain itu pemerintah daerah juga berupaya memberikan fasilitas yang berkaitan dengan kepariwisataan untuk

mendukung kegiatan pariwisata di *Goa Gong* dan mendukung perkembangan *Goa Gong*. Hal tersebut dilakukan karena saat ini *Goa Gong* menjadi salah satu obyek wisata yang diharapkan dapat membantu program-program pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat Pacitan.

Dalam pengelolaan pariwisata, idealnya terdapat tujuan dari kebijakan pariwisata. Church (dalam Goerge, dkk, 2009: 200), berpendapat bahwa ada tiga tujuan utama dari kebijakan pariwisata dalam tingkat lokal dan regional, yaitu diversifikasi ekonomi, pembaharuan ekonomi, dan untuk mengatasi perpecahan sosial. Pada konteks ini, akan dijelaskan mengenai tiga tujuan kebijakan pariwisata yang terjadi di obyek wisata *Goa Gong*. Diversifikasi ekonomi merupakan penganekaragaman usaha untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pekerjaan. Dalam ranah pariwisata digunakan sebagai pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam melalui penciptaan peluang pekerjaan di bidang pariwisata. Peluang pekerjaan tersebut dapat berupa produk pariwisata yang dikonsumsi di destinasi pariwisata, sehingga dapat menciptakan pekerjaan untuk masyarakat misalnya berdagang dan jasa.

Penganekaragaman usaha ini terlihat pada masyarakat Desa Bomo, di mana masih terdapat lahan persawahan yang luas dan masih melakukan pekerjaan sebagai petani. Selain melakukan pekerjaan sebagai petani, masyarakat di sana juga memiliki pekerjaan lain dalam ranah pariwisata yaitu dengan membuka lapak di Pasar Souvenir, menawarkan jasa senter, payung serta sebagai pemandu wisata, dan tukang ojek yang semuanya berkaitan dengan pariwisata. Kegiatan seperti itu bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan satu jenis pekerjaan saja.



Selain diversifikasi ekonomi, kebijakan pariwisata juga bertujuan untuk pembaharuan ekonomi. Dalam hal ini peran pemerintah dalam menciptakan tempat tujuan wisata yang baru sangat diperlukan, yang paling penting adalah pengembangan infrastruktur wilayah pariwisata. Selain itu pemerintah juga diharapkan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar kawasan pariwisata agar dapat terbuka dan ikut serta menjaga kenyamanan daerah wisata.

Dalam hal pembaharuan ekonomi di ranah pariwisata, pemerintah akan mengoptimalkan peran serta masyarakat di sekitar pariwisata, misalnya pelaku seni di daerah setempat agar dapat mempertahankan tradisi yang ada, kemudian makanan khas atau produk khas daerah sehingga akan menjadi industri khas daerah yang itu semua bertujuan untuk memberikan dampak positif dari adanya pariwisata untuk perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam hal ini sudah melakukan pembaharuan ekonomi kepada masyarakat Pacitan.

Melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Pacitan. Berkaitan dengan pariwisata, masyarakat dihimbau untuk dapat menjadi pelaku UMKM seperti industri olahan ikan, industri olahan kayu, industri batu mulia yang itu semua dapat dijadikan sebagai khas daerah disaat wisatawan datang berwisata di Kabupaten Pacitan.

Kebijakan pariwisata juga bertujuan untuk mengatasi adanya perpecahan sosial, dengan adanya kebijakan pariwisata sebagai acuan pengembangan pariwisata nantinya akan dapat mengatasi timbulnya konflik. Hal tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan dampak yang justru merugikan bagi pengembangan pariwisata. Dalam pengelolaan obyek wisata *Goa Gong*, terdapat

sistem pengelolaan yang berbeda dengan obyek wisata yang lainnya, yaitu sistem sewa antara pemilik gua dengan pemerintah daerah. Hal tersebut menjadikan adanya sistem perjanjian kontrak antara pemilik dengan pemerintah daerah, sehingga nantinya pengelolaan *Goa Gong* dapat berjalan dengan baik. Selain itu masyarakat juga mendukung pengelolaan *Goa Gong*, meskipun pada akhirnya pengelolaan dipegang oleh pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan pariwisata, biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta, dan masyarakat sekitar kawasan obyek wisata. Secara umum masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan suatu obyek pariwisata, karena merekalah yang lebih memahami situasi di sekitar obyek pariwisata. Masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan suatu obyek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling berkaitan. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan sampai dengan implementasi dan pengawasan dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pariwisata tersebut bermanfaat bagi masyarakat lokal dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari (Timothy, 2003: 5).

Kaitannya dengan apa yang terjadi pada obyek wisata *Goa Gong*, setelah *Goa Gong* dijadikan obyek wisata oleh masyarakat Desa Bomo kemudian dikelola oleh mereka secara swadaya. Berjalan 1 tahun pengelolaan diserahkan kepada pemerintah daerah karena adanya suatu hal yang mengharuskan pihak desa menyerahkan pengelolaan. Melihat hal tersebut besar kemungkinan bahwa masyarakat Desa Bomo terlibat dalam pengelolaan, khususnya dalam struktur kepengurusan gua, tetapi tidak demikian di *Goa Gong*. Secara formal masyarakat



tidak terlibat dalam kepemimpinan gua, tetapi masyarakat terlibat pada kegiatan informal saja seperti berdagang dan menawarkan jasa di sekitar *Goa Gong*.

Keterlibatan masyarakat dalam tahapan-tahapan yang sesuai dengan kebijakan pariwisata seperti tahap perencanaan, implementasi dan pengawasan merupakan hal yang terpenting dalam pariwisata. Melalui hal itu dapat dilihat sejauh mana keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam pengelolaan sesuai dengan tahapan tersebut. Pada tahap perencanaan, seperti rapat dalam perumusan kebijakan atau pembuatan program-program kegiatan, keterlibatan masyarakat sangat berperan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan maupun pengembangan pariwisata. Kenyataan yang terjadi pada masyarakat Desa Bomo menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, karena sistem pengelolaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kemudian pada tahap implementasi atau pelaksanaan hasil perencanaan kebijakan, dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat Desa Bomo yang secara informal yaitu pengelolaan usaha-usaha di kawasan *Goa Gong*. Meskipun masyarakat tidak memiliki hak dalam pengelolaan gua, tetapi masyarakat Bomo masih bisa untuk masuk melakukan kegiatan ekonomi yaitu berdagang maupun menawarkan jasa. Terakhir pada tahap pengawasan, pada dasarnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan pariwisata memiliki peran kontrol yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan obyek pariwisata. Keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam hal ini tidak terlalu dominan, masyarakat hanya ikut membantu dalam mengawasi sekitaran gua jika ada yang mencurigakan. Misalnya ada orang yang tidak dikenal datang ke gua pada waktu *Goa Gong* sudah tutup. Mereka

biasanya langsung mendatangi orang tersebut dan menanyakan maksud tujuannya.

Jadi sepenuhnya pengelolaan *Goa Gong* ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Sebenarnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat membantu atau berkontribusi bagi pembangunan nasional yang lebih baik dalam jangka panjang. Dengan cara tersebut, partisipatif dapat menjadi alat untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional, karena keterlibatan masyarakat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pariwisata. Hal tersebut terjadi karena masyarakat memiliki potensi untuk membantu melindungi dan melestarikan sosial budaya, sejarah dan sumber daya alam yang penting dalam lingkup pariwisata. Selain itu juga meningkatkan rasa saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat lokal dengan membangun pemahaman yang lebih baik di antara mereka (Timothy, 2003: 6).

Dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semuanya masyarakat yang berada di kawasan wisata memiliki peluang yang besar untuk terlibat dalam pengelolaan suatu obyek pariwisata. Pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan karena merasa tidak memerlukannya. Masyarakat Desa Bomo juga demikian, mereka tidak perlu ikut dalam pengelolaan karena tidak adanya hak untuk terlibat. Hanya beberapa saja yang dapat terlibat dalam pengelolaan yaitu pemilik, penemu, dan aparat desa saja. Masyarakat lainnya hanya bisa melihat, merasakan dan menerima manfaat adanya pariwisata *Goa Gong* ini dalam kehidupannya. Jadi, dalam pengelolaan *Goa Gong* ini sepenuhnya dipikirkan dan dibuat oleh pemerintah daerah.



## 1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan yang penulis angkat, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena untuk mengungkapkan fenomena sosial secara mendalam yang dicari melalui pandangan dan pengalaman masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, nantinya bisa mendapatkan perspektif yang lebih alami dari suatu kehidupan di masyarakat dan cocok untuk mengeksplorasi isu-isu yang kompleks serta untuk mempelajari proses yang terjadi dari waktu ke waktu (Lewis, 2003: 5).

Penelitian ini akan mencoba menjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki, dan memahami fenomena sosial yang ada di daerah obyek wisata *Goa Gong* mengenai mengapa masyarakat Desa Bomo tidak dilibatkan dalam pengelolaan obyek wisata *Goa Gong*, mengingat bahwa demi berkembangnya suatu obyek pariwisata sebaiknya masyarakat juga dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan yang nantinya akan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, penulis melakukan penelitian dengan berkunjung ke obyek wisata *Goa Gong* dan Desa Bomo, karena Desa Bomo merupakan tempat dimana obyek wisata *Goa Gong* berada. Hal tersebut nantinya juga akan memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian, pencarian data yang dibutuhkan, kemudian memudahkan penulis untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di sana dan memahami perilaku-perilaku masyarakat di sana. Agar dapat memenuhi hal tersebut, adapun langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah wisata *Goa Gong* tepatnya di Dusun Pule, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Alasan penulis memilih *Goa Gong* menjadi lokasi penelitian adalah karena *Goa Gong* merupakan salah satu obyek wisata yang perkembangannya sangat baik di Kabupaten Pacitan, selain itu obyek wisata ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Bomo. Selain itu juga *Goa Gong* merupakan obyek wisata yang dulunya ditemukan oleh masyarakat Desa Bomo dan dibangun menjadi obyek wisata dan dikelola oleh masyarakat sendiri, akan tetapi sekarang ini pengelolaannya dipengang oleh pemerintah daerah. Dengan begitu, besar kemungkinan apabila masyarakat Desa Bomo terlibat dalam pengembangan obyek wisata *Goa Gong*, karena merekalah yang mengerti akan kondisi di sekitar mereka, tetapi malah sebaliknya. Masyarakat Desa Bomo tidak dilibatkan dalam tahapan proses pengelolaan obyek wisata, mereka hanya dapat menerima keputusan dari pemerintah daerah dan hanya dapat melaksanakan keputusan dan merasakan hasil dari adanya pariwisata.

### 1.5.2 Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *snowbal sampling*. Menurut (Subgyo, 2006: 31) *snowbal sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key informan* dan dari *key informan* inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel. Berdasarkan teknik tersebut maka pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut berdasarkan atas penentuan sampel yang mulanya



berjumlah sedikit kemudian bertambah menjadi banyak. Penentuan informan pertama yaitu informan utama berjumlah dua orang kemudian jika dirasa belum cukup untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka informan yang selanjutnya disarankan oleh informan utama atau kunci.

Informan dalam penelitian ini adalah beberapa orang yang mengetahui secara mendalam dan detail tentang masalah yang diteliti. Informan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti adalah:

1. Pihak pengelola *Goa Gong* yaitu Kepala UPTD obyek wisata *Goa Gong*, karena beliau akan lebih mengerti dan paham dengan permasalahan yang ada. Hal ini juga berkaitan dengan sistem pengelolaan gua yang diterapkan oleh pemerintah.
2. Penemu *Goa Gong*, sebagai pihak yang mengetahui sejarah gua dan latar belakang *Goa Gong* dapat menjadi obyek pariwisata. Hal ini juga berkaitan dengan sistem pengelolaan gua.
3. Masyarakat Desa Bomo yang dapat memberikan informasi terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan *Goa Gong*, dan manfaat adanya *Goa Gong* dalam kehidupannya.

Berdasarkan kriteria informan tersebut, peneliti mengklasifikasikan menjadi dua informan yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD *Goa Gong* dan salah satu penemu *Goa Gong*, sedangkan informan pendukungnya adalah masyarakat yang dipilih baik yang bekerja di kawasan *Goa Gong* maupun tidak. Dalam pemilihan informan ini, peneliti tidak menyebutkan nama asli dari pihak-pihak yang terlibat.

Hal ini dikarenakan untuk melindungi informan dari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.

**Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian**

	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Pekerjaan</b>
<b>Informan Utama</b>	Bapak Toni	50 tahun	Kepala UPTD <i>Goa Gong</i>
	Bapak Parlan (Penemu <i>Goa Gong</i> )	67 tahun	Wiraswasta
<b>Informan Pendukung</b>	Bapak Joan	32 tahun	Aparatur desa
	Bapak Tomi	50 tahun	Tukang Ojek
	Bapak Agus	38 tahun	Tukang Ojek
	Bapak Edi	38 tahun	Karyawan <i>Goa Gong</i>
	Bapak Gino	35 tahun	Karyawan <i>Goa Gong</i>
	Bapak Sarlan	45 tahun	Karyawan Swasta
	Ibu Miati	49 tahun	Pedagang
	Ibu Wati	41 tahun	Pedagang
	Ibu Siti	38 tahun	Jasa Senter dan Payung

Sumber: Data Hasil Penelitian di Obyek Wisata *Goa Gong*

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian ini dilakukan secara berkala dengan rentan waktu 2 bulan dari 8 Maret 2016 sampai dengan 8 Mei 2016. Untuk mendapatkan data, penulis tidak menetap di lokasi penelitian, karena jarak tempat tinggal penulis yang tidak terlalu jauh dari lokasi penelitian. Selain itu penulis juga tidak hanya melakukan penelitian di kawasan obyek wisata *Goa Gong* saja, tetapi juga di wilayah pemerintahan juga yaitu di Dinas Pariwisata pacitan. Dalam melakukan



penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari informan, yaitu:

a. Observasi

Observasi ini didasarkan pada pengalaman secara langsung yang dialami oleh peneliti terhadap fenomena yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan yaitu dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui keadaan sosial masyarakat dan difokuskan pada masalah yang akan dikaji. Selain itu dengan observasi akan mendapatkan kesempatan untuk mereka dan menganalisis perilaku dan interaksi yang terjadi (Lewis, 2003:35).

Peneliti melakukan observasi dengan cara, pada awalnya peneliti berkunjung ke obyek wisata *Goa Gong* dan mengamati fenomena yang terjadi di sana. Pada saat itu pengunjung *Goa Gong* sangat ramai karena bertepatan dengan hari libur sekolah. Kemudian peneliti mengamati lebih masuk lagi dan menemukan satu tempat dimana banyak sekali penjual yang menjajakan barang dagangannya. Lalu peneliti sempat berpikir bahwa, suasana desa di sekitar obyek wisata *Goa Gong* yang sepi, maksudnya banyak rumah-rumah yang selalu tutup pintu dan aktivitas masyarakat yang tidak terlihat di sekitar rumah. Melalui hal itu terlintas pemikiran bahwa lingkungan desa sepi berarti masyarakat bekerja di gua dan juga berpikiran bahwa gua dikelola oleh masyarakat desa. Melalui hipotesa tersebut kemudian peneliti bertanya-tanya kecil dengan salah satu karyawan di sana yang sedang duduk-duduk mengenai pengelolaan di *Goa Gong*. Dari hasil wawancara kecil peneliti dengannya, berbanding terbalik dengan hipotesa peneliti bahwa *Goa Gong* ini dikelola oleh pemerintah dan masyarakat tidak terlibat. Dari

hal itu, menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut, mengingat bahwa pariwisata itu biasanya melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### b. Wawancara

Peneliti melakukan tatap muka untuk wawancara dengan informan atau kelompok yang terlibat dalam wawancara. Wawancara dilakukan untuk penelitian yang membutuhkan pemahaman tentang fenomena atau tanggapan terhadap proses atau pengalaman informan, dan dengan wawancara akan memberikan fokus yang dalam pada setiap individu yang memungkinkan peneliti untuk merefleksikannya dan menarik perbandingan dengan apa yang ia dengar dari orang lain (Lewis, 2003: 36). Untuk menggali informasi penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, dimana peneliti mendorong pihak yang diwawancarai untuk mengemukakan semua gagasan dan perasaannya secara bebas dan nyaman dengan bahasa yang akrab dan informal. Wawancara mendalam dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai masalah yang diteliti, yaitu tentang pengelolaan gua dulu hingga sekarang dan keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam pengelolaan *Goa Gong*.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi melibatkan studi dokumen yang ada, baik untuk memahami isi substantif atau untuk menerangi makna yang lebih dalam yang dapat diungkapkan oleh mereka. Dokumen ini seperti laporan media, makalah pemerintahan atau bahkan publikasi, dokumen prosedural seperti risalah rapat, surat-surat resmi, atau dokumen pribadi seperti catatan lapangan atau foto (Lewis,



2003: 35). Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pendokumentasian gambar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan menggali informasi dari buku-buku atau catatan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretatif, yang dilakukan dengan cara memahami makna-makna yang terkandung dalam setiap data yang ditemukan peneliti pada waktu melakukan penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

##### a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu analisis yang merujuk pada proses pemilihan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Milles, 1992,16). Reduksi data dilakukan setelah mendapatkan informasi melalui wawancara dengan informan, observasi secara langsung dan penelusuran melalui buku atau *literature* sesuai dengan tema penelitian yang dibahas. Kemudian hasil wawancara dan observasi langsung diseleksi dan digolongkan mana saja data yang diperlukan data yang tidak perlu dengan cara transkrip data. Dari reduksi data ini nantinya dapat memudahkan peneliti dalam mengkaji hasil penelitian dalam pembahasan.

##### b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Dengan melihat apa yang sedang terjadi dan akhirnya dapat menarik kesimpulan dengan baik (Milles, 1992, 17).

c. Penarikan/verifikasi kesimpulan

Verifikasi adalah sebagian dari kegiatan yang utuh yang dihasilkan dari pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau sebagai hasil tukar menukar pikiran antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam perangkat data yang lain (Milles, 1992,18-19). Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan tentang permasalahan yang penulis teliti dengan cara menganalisis informasi yang diperoleh, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang ada.

## 1.6 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang berguna untuk mempermudah dalam penyusunan agar menghasilkan pembahasan yang sistematis.

Pertama penulis memulai dengan BAB I yang merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan penelitian yang penulis lakukan, kemudian rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, metode penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian dan terakhir sistematika penyusunan.



Kedua, dalam BAB II ini penulis menguraikan tentang kondisi wisata Goa Gong dan masyarakat Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.

Uraian tersebut mencakup tentang letak geografis, demografi, pendidikan, keagamaan, dan mata pencaharian yang semuanya berkaitan dengan adanya obyek wisata *Goa Gong*.

Ketiga, dalam BAB III ini penulis menguraikan tentang temuan penelitian, berisikan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini penulis membahas temuan data tentang pengelolaan obyek wisata *Goa Gong* yang didalamnya terdapat sub bab mengenai mitos dan penemuan *Goa Gong*, terbentuknya *Goa Gong* menjadi obyek pariwisata, sistem kepemilikan *Goa Gong*, dan sentuhan pemerintah daerah terhadap *Goa Gong*.

Keempat, setelah memperoleh data dari penelitian, maka dalam BAB IV ini penulis menjelaskan serta mengaitkan antara temuan data dan teori yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini untuk dianalisa. Pembahasan ini lebih fokus pada permasalahan yang diteliti, karena merupakan jawaban dari rumusan masalah, sehingga dari bab ini akan diketahui alasan ketidakterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam pengelolaan wisata *Goa Gong*.

Kelima, dalam bab terakhir penulisan skripsi ini yaitu BAB V, yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.

Kesimpulan ini menjelaskan inti permasalahan jawaban dari rumusan masalah, kemudian ditutup dengan rekomendasi dari penulis mengenai permasalahan yang diteliti agar nantinya penelitian ini dapat dikembangkan dan sebagai bahan

pertimbangan bagi penentu kebijakan agar obyek pariwisata *Goa Gong* dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat lokal.





## BAB II

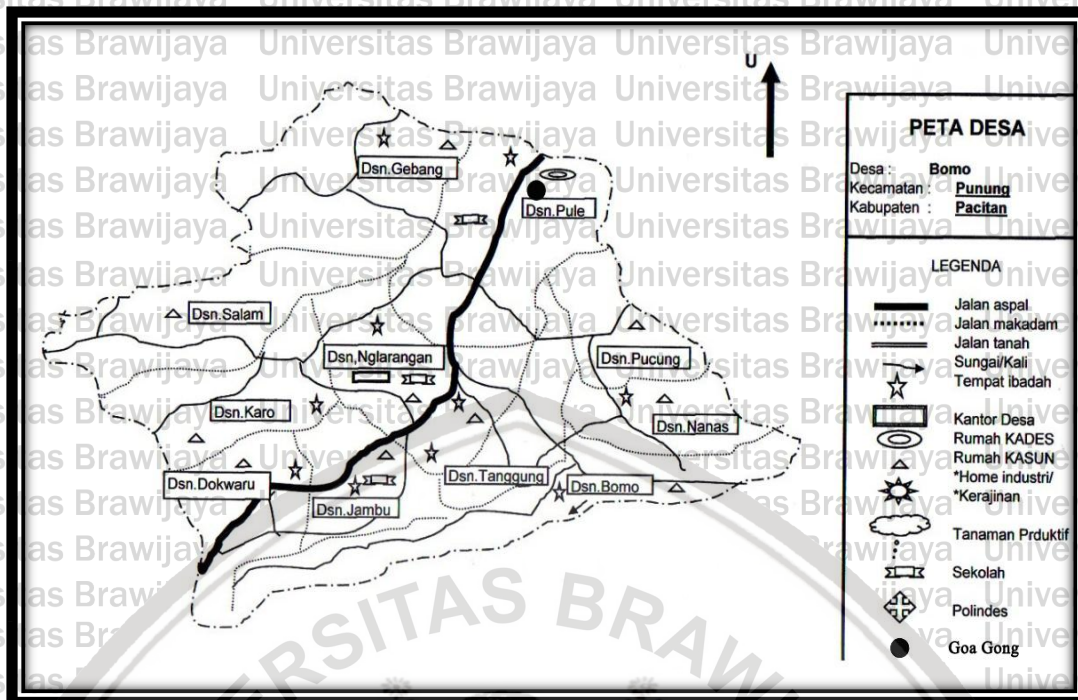
### SETTING WILAYAH, BUDAYA, DAN KEMASYARAKATAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, dimana juga terdapat obyek pariwisata di desa tersebut, yaitu obyek wisata *Goa Gong* yang juga sebagai tempat penelitian penulis. Wilayah Desa Bomo sebagian besar berupa bukit dan gunung, serta jurang terjal. Pada bagian bab ini akan dijelaskan mengenai keadaan Desa Bomo, mulai dari aspek geografis, demografis, pendidikan, keagamaan, dan mata pencaharian hidup yang semuanya berkaitan dengan keberadaan obyek wisata *Goa Gong*. Hal tersebut agar memberikan gambaran umum kondisi wilayah penelitian dan sebagai latar belakang untuk memahami persoalan yang terkait dengan tujuan penelitian.

#### 2.1 Letak Geografis

Desa Bomo merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan yang terletak 8 km dari arah kota kecamatan, 37 km dari arah kabupaten atau kota Pacitan dan 381 dari arah provinsi Jawa Timur.

Desa Bomo memiliki luas wilayah seluas 1.161.883,4 hektar yang terdiri dari lahan pemukiman seluas 125.129 Ha, perkebunan 55.322 Ha, pemakaman seluas 4,8 Ha, pekarangan seluas 120.145 Ha, perkantoran 1,368 Ha, tegal atau ladang seluas 861.231 Ha, hutan rakyat seluas 33,193 Ha, dan lahan untuk prasarana umum lainnya seluas 17, 0409 Ha.



**Gambar 2.1 Peta Desa Bomo**

Berdasarkan data dari profil desa, Desa Bomo ini merupakan desa berbukit dengan tingkat kemiringan tanah  $15^\circ$ , selain itu Desa Bomo juga termasuk desa kawasan wisata. Secara administratif, masyarakat Desa Bomo tersebar di 11 dusun yaitu Dusun Gebang, Pule, Salam, Nglarangan, Pucung, Karo, Dokwaru, Jambu, Tanggung, Bomo, dan Nanas. Desa Bomo juga memiliki batas wilayah dengan desa lain yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Desa Sekar Kecamatan Donorojo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dersono Kecamatan Pringkuku, sebelah timur berbatasan dengan Desa Piton Kecamatan Punung, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sendang Kecamatan Donorojo.

Desa Bomo memiliki obyek wisata yaitu *Goa Gong* yang memiliki panjang 256 meter dan tepatnya berada di Dusun Pule, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Seperti yang ada pada gambar 2.2, jarak menuju *Goa Gong* dari pusat kota Pacitan kurang lebih 30 km dengan waktu tempuh 1 jam. *Goa*



*Gong* ini dikelilingi oleh sederetan gunung yaitu, sebelah utara Gunung Manyar, sebelah timur Gunung Gede, sebelah selatan Gunung Karang Pulut, dan sebelah barat Gunung Grugah.

*Goa Gong* ini memiliki keindahan alami yaitu stalagmit dan stalagtit yang berada di dalam gua. Stalagmit dan stalagtit yang ada di *Goa Gong* ini diabadikan dengan nama Selo Cengger Bumi, Selo Gerbang Giri, Selo Citro Cipto Agung, Selo Pakuan Bomo, Selo Adi Citro Buwono, Selo Bantaran Angin, dan Selo Susu Angin. Selain memiliki stalagmit dan stalagtit, di dalam *Goa Gong* ini juga memiliki 5 sendang. Sendang adalah sungai kecil yang ada di dalam goa, 5 sendang tersebut adalah Sendang Panguripan, Sendang Jampi Rogo, Sendang Kamulyan, Sendang Ralung Nisto, dan Sendang Relung Jiwo. Sendang ini oleh masyarakat yang mempercayainya di nilai magis untuk menyembuhkan penyakit.

Keberadaan *Goa Gong* di Desa Bomo menjadi tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi bagi sebagian masyarakat di sana. Masyarakat Desa Bomo memanfaatkan keberadaan *Goa Gong* untuk melakukan kegiatan ekonomi yaitu berdagang dan menawarkan jasa seperti jasa menyewakan senter dan payung, tukang ojek, angkutan umum, fotografi, dan pemandu wisata. Masyarakat yang lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan ekonomi di *Goa Gong* adalah masyarakat Dusun Pule, sedangkan masyarakat dusun lain hanya beberapa saja. Masyarakat yang tidak ikut berkecimpung di *Goa Gong* memiliki kegiatan ekonomi lain seperti bertani, sopir, karyawan, dan berdagang di pasar. Jadi, jalannya perekonomian *Goa Gong* dalam konteks informal lebih banyak didominasi oleh masyarakat Dusun Pule dan tidak semua masyarakat Desa Bomo bergantung pada *Goa Gong* untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

## 2.2 Demografi dan Pendidikan

Berdasarkan data dari profil Desa Bomo pada tahun 2013, secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Bomo adalah 2.924 jiwa dengan 926 kepala keluarga, yang terdiri dari 1.423 jiwa penduduk laki-laki dan 1.501 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah kepadatan penduduk 37,6/km<sup>2</sup>. Mayoritas penduduk Desa Bomo adalah etnis Jawa, akan tetapi ada juga beberapa penduduk yang berasal dari Sunda. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai data jumlah penduduk, berikut adalah data jumlah penduduk Desa Bomo berdasarkan usia mulai dari yang baru lahir sampai usia tua:

**Tabel 2.1 Data Usia Penduduk Desa Bomo**

NO	Usia	Jumlah	Presentase Dari Jumlah Penduduk
1	0-12 bulan	15 jiwa	0,4%
2	1-5 tahun	93 jiwa	3,1%
3	5-7 tahun	186 jiwa	6,3%
4	7-18 tahun	378 jiwa	12,8%
5	18-56 tahun	1.489 jiwa	50,4%
6	> 56 tahun	897 jiwa	30,4%

(Sumber: Data Profil Desa Bomo Tahun 2013)

Dalam masalah pendidikan di Desa Bomo ini terlihat tidak cukup baik, karena tidak sedikit masyarakat Desa Bomo yang tidak menempuh pendidikan.

Untuk lebih jelasnya bagaimana kondisi pendidikan masyarakat Desa Bomo dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



**Tabel 2.2 Data Pendidikan Masyarakat Desa Bomo**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah (Balita)	81 jiwa
2	Tidak Pernah Sekolah	343 jiwa
3	Tidak Tamat SD	20 jiwa
4	Tamat SD/Sederajat	674 jiwa
5	Tamat SMP/Sederajat	566 jiwa
6	Tamat SMA/Sederajat	229 jiwa
7	Tamat D-1	-
8	Tamat D-2	24 jiwa
9	Tamat D-3	-
10	Tamat S-1	21 jiwa
11	Tamat S-2	-
12	Tamat S-3	1 jiwa

(Sumber: Data Profil Desa Bomo 2013)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Bomo dapat dikatakan rendah. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kelulusan sekolah paling banyak pada masyarakat di sana adalah tamat SD/ sederajat yaitu 674 jiwa, sedangkan masyarakat yang tidak pernah sekolah sebanyak 343 jiwa. Kemudian tidak sedikit pula masyarakat Bomo yang tingkat pendidikannya sampai pada SMP dan SMA, tetapi yang disayangkan tingkat pendidikan Strata-1 hanya 21 jiwa dan Strata-3 hanya 1 jiwa saja. Melihat dari rendahnya pendidikan pada masyarakat Bomo, hal tersebut terjadi karena minimnya biaya untuk sekolah dan mereka lebih ingin untuk bekerja saja.

Rendahnya pendidikan di sana, menjadikan mereka lebih keras lagi dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah tidak sedikit masyarakat di sana yang rela merantau ke luar kota untuk bekerja, sedangkan masyarakat yang tidak merantau mengandalkan lahan pertanian yang ada di sana, seperti buruh tani, tukang kayu, sopir angkutan, dan tukang ojek.

Meskipun demikian masyarakat Bomo juga ada yang bekerja sebagai PNS maupun karyawan swasta.

Untuk memperbaiki rendahnya tingkat pendidikan di Desa Bomo, di sana terdapat sarana pendidikan untuk mendukung masyarakatnya agar dapat mengecam pendidikan, diantaranya berupa gedung TK 1 buah, gedung SD 3 buah, gedung SMP 1 buah, akan tetapi di Desa Bomo tidak ada gedung SMA. Mereka harus ke kecamatan agar dapat sekolah tingkat SMA. Seiring berkembangnya zaman, menurut masyarakat Desa Bomo pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan mereka. Meskipun letak tinggal mereka berada di desa yang cukup jauh dari kota, hal tersebut bukanlah kendala dalam mengecam pendidikan.

Dengan perkembangan zaman seperti saat ini, banyak cara untuk menempuh pendidikan, apalagi di Desa Bomo juga sudah ada gedung sekolah yang mereka pikir hal tersebut sangat bermanfaat bagi mereka. Apabila terdapat kendala jauhnya jarak rumah dengan sekolah yaitu SMA, sekarang mereka tidak kesulitan seperti dulu yang harus berjalan kaki, sedangkan sekarang sudah ada transportasi umum bahkan motor milik sendiri untuk menuju ke sekolah SMA.



### 2.3 Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari profil Desa Bomo, keseluruhan masyarakat Desa Bomo beragama Islam. Masyarakat Desa Bomo juga menganut ajaran Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan peribadatan sebagaimana mestinya.

Hampir di setiap dusun di Desa Bomo terdapat masjid dan mushalla untuk tempat beribadah mereka. Menurut masyarakat Desa Bomo, kepercayaan akan adanya

Tuhan akan berdampak positif bagi kehidupannya. Mereka juga berusaha untuk tidak pernah memunculkan konflik yang nantinya dapat mengakibatkan keretakan ikatan persaudaraan antara mereka. Dengan begitu terciptalah perdamaian karena dilatarbelakangi oleh sikap mereka sendiri yang saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Masalah sekecil apapun yang muncul dalam keseharian mereka, mereka berusaha untuk dapat memecahkan atau menyelesaikan, sehingga tidak sampai menimbulkan permasalahan yang besar.

Di dalam kehidupan masyarakat Desa Bomo juga terdapat tradisi keagamaan yaitu Tahlilan. Tahlilan merupakan ritus keagamaan masyarakat Desa Bomo yang menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan ketika ada salah satu warga yang meninggal. Biasanya Tahlilan ini dilaksanakan pada hari pertama hingga hari ketujuh, pada hari ke 40, hari ke 100, memperingati kematian pertama, memperingati kematian kedua, hari ke 1000, dan selanjutnya setiap tahun sekali, tergantung pihak keluarga yang melaksanakan kegiatan tersebut. Biasanya Tahlilan ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bomo pada malam hari setelah sholat Maghrib atau setelah sholat Isya' di rumah orang yang meninggal.

Masyarakat Desa Bomo juga selalu rutin melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian, memperingati kelahiran Nabi, memperingati

Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha dan perayaan lainnya. Mereka melakukan hal tersebut karena mereka juga terbiasa dengan apa yang dilakukan orang-orang terdahulu mereka, sehingga mereka tidak bisa begitu saja menghilangkan atau menghapus kegiatan seperti hal tersebut. Selain itu mereka merasa bahwa dengan melakukan hal tersebut mereka nantinya akan mendapatkan barokah dari Sang Pencipta, sehingga mereka tidak akan berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang mereka dapatkan selama hidupnya.

Masyarakat Desa Bomo juga percaya adanya hal-hal spiritual, seperti halnya percaya terhadap orang pintar atau dukun yang menurut mereka adalah perantara dari Tuhan untuk menyembuhkan sakit atau membantu melancarkan rezeki. Meskipun di Desa Bomo tidak ada dukun tapi masyarakat di sana masih ada yang sering pergi ke dukun untuk menyembuhkan sakit atau membantu melancarkan rezeki. Pada umumnya seorang dukun memiliki ilmu diperoleh salah satunya dari bertapa atau semedi. Berkaitan dengan bertapa, *Goa Gong* yang berada di Desa Bomo ini sering dijadikan bertapa oleh masyarakat. Banyak orang yang datang dari luar daerah seperti Ngawi, Tuban, Bojonegoro memanfaatkan *Goa Gong* untuk bertapa. Biasanya tujuan mereka bertapa ini untuk mendapatkan ilmu spiritual. Masyarakat Desa Bomo juga memahami hal tersebut, selain itu juga mereka percaya bahwa gua tersebut memiliki sisi magisnya.

#### **2.4 Mata Pencapaian**

Desa Bomo merupakan daerah wilayah perbukitan dimana juga terdapat lahan pertanian maupun perkebunan yang luas. Sebanyak 1.379 jiwa, penduduk Desa Bomo hidup sebagai petani, karena dilihat dari kondisi wilayahnya yang sebagian besar merupakan area persawahan. Selain bertani, masyarakat Desa



Bomo juga berkebun, berternak. Hasil pertanian maupun perkebunannya antara lain, padi, jagung, kacang tanah, kacang panjang, ubi kayu, jeruk, mangga, pepaya, pisang, melinjo, kelapa, dan kapas. Selain hasil bertani dan berkebun, masyarakat Desa Bomo juga menghasilkan kayu dan rumput gajah dari hutan atau ladang mereka. Semua hasil tersebut biasanya dijual ke pasar, dijual secara ecer, bahkan dijual melalui tengkulak. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bomo dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan mereka.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat Desa Bomo tidak hanya mengandalkan kondisi atau hasil alam saja, akan tetapi juga ada masyarakat di sana yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), karyawan swasta, sopir, tukang ojek, tukang batu, tukang kayu. Selain itu juga terdapat industri makanan dan industri kerajinan di sana, masyarakat di Desa Bomo juga melakukan usaha baik di bidang jasa, perdagangan, dan angkutan. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Bomo yang terlihat jelas, yaitu bekerja di sekitar obyek pariwisata. Sudah dijelaskan di atas bahwa Desa Bomo ini juga merupakan daerah kawasan wisata, Desa Bomo memiliki obyek wisata yaitu *Goa Gong* yang tepatnya terletak di dusun Pule.

Sebagian besar masyarakat Desa Bomo memanfaatkan keberadaan *Goa Gong* untuk mencukupi perekonomian keluarga mereka, baik di bidang jasa, perdagangan, maupun angkutan. Cukup banyak dari mereka yang berjualan di sekitar *Goa Gong*, selain itu ada juga dari mereka yang menjadi tukang ojek bagi para wisatawan yang hendak menuju ke lokasi gua. Melihat situasi yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, tukang ojek ini pada akhirnya membentuk

komunitas ojek yang diberi nama “Paguyuban Ojek Wisata Goa Gong”.

Paguyuban ojek ini ada dari inisiatif dari masyarakat Desa Bomo sendiri, karena melihat bahwa *Goa Gong* ini selalu ramai dikunjungi wisatawan dan jarak antara lahan parkir dengan lokasi gua yang cukup membuat lelah wisatawan karena jalan yang naik turun. Paguyuban ojek ini sudah ada kurang lebih selama 1,5 tahun yang biasanya bekerja setiap hari Sabtu, Minggu dan disaat hari libur, karena pada saat itulah *Goa Gong* ramai dikunjungi wisatawan.

Jadi, Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah kawasan wisata yang ada di Pacitan. Obyek wisata yang ada di sana adalah *Goa Gong*, dimana obyek wisata ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Bomo. Sebagian masyarakat di sana memanfaatkan *Goa Gong* sebagai tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi tidak semua bergantung pada *Goa Gong* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, selain itu *Goa Gong* juga memiliki fungsi religi bagi masyarakat di sana bahkan orang di luar daerah Pacitan. Kemudian untuk mengetahui temuan data mengenai mitos dan penemuan *Goa Gong*, *Goa Gong* menjadi obyek wisata hingga proses pengelolaan gua akan dibahas di bab selanjutnya.



### BAB III

## PENGELOLAAN OBYEK WISATA GOA GONG

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil temuan lapangan mengenai *Goa Gong* sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Pacitan. Untuk menjelaskan temuan lapangan ini, penulis menguraikan beberapa hal yang dapat menjelaskan tentang pengelolaan obyek wisata *Goa Gong*, mulai dari mitos dan penemuan gua, kemudian membahas tentang *Goa Gong* yang akhirnya dijadikan sebagai obyek pariwisata. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai sistem kepemilikan gua dan apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan *Goa Gong*.

### 3.1 Mitos dan Penemuan *Goa Gong*

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, gua ini ditemukan oleh 8 warga Desa Bomo pada tahun 1995. Sebelum melakukan penelusuran untuk menemukan gua, masyarakat Desa Bomo mendapatkan cerita dari sesepuh bahwa dahulu di timur gunung yang berada di Desa Bomo tersebut terdapat sumber air, tepatnya di dalam gua. Saat itu Desa Bomo mengalami kemarau panjang sehingga kesulitan untuk mendapatkan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Salah satu warga atau sesepuh Desa Bomo bernama Mbah Daus, bersama temannya mencoba untuk mengambil air ke dalam gua dengan menggunakan alat penerangan seadanya yaitu berupa obor yang terbuat dari daun kelapa kering lalu diikat dan akhirnya mereka menemukan sumber air. Setelah Mbah Daus dan temannya masuk ke dalam gua, masyarakat dilarang untuk masuk ke dalam gua,

ada cerita dari sesepuh bahwa tempat tersebut *angker* atau berbahaya, sehingga sejak adanya larangan itu tidak ada orang yang berani masuk ke dalam gua.

*"Mbien niko pas kulo tasih alit diceritani nek Mbah Daus sesepuh mbien nemokne sumber ning njero guo, tapi anak putu dipenging mlebet mbak...masalaha angker, jarene wong-wong mbien bahaya corone nek angker kui lak akeh jin-jin kan mbak. Terus jaman mbiyen mboten wonten sing wantun mlebet."*

(Dulu waktu saya masih kecil mendapat cerita bahwa Mbah Daus sesepuh dulu menemukan sumber air di dalam gua, tetapi anak cucu dilarang masuk mbak, karena angker, katanya orang-orang dulu tidak ada yang berani masuk). **Wawancara dengan Bapak Parlan, 07/04/2016 pukul 10.42 WIB.**

Kemudian di tahun 1995, tepatnya hari Minggu Pon tanggal 5 Maret 1995, rombongan yang berjumlah 8 orang yaitu Bapak Supri sesepuh desa, Warno ketua rombongan, Parlan ketua RT, Paidi guru, Suparno kepala dusun, Prio warga desa, Sutikno warga desa, dan Maman warga desa sepakat menelusuri gua dengan adanya cerita dari sesepuh dahulu. Bapak Parlan bersama teman-temannya ingin membuktikan cerita dari sesepuh dahulu bahwa apakah benar di dalam gua tersebut ada sumber airnya dan apakah benar gua tersebut berbahaya.

Dengan bekal air minum dan alat penerangan yaitu 7 buah senter, 2 korek api dan lampu petromak, mereka mulai untuk mencari mulut gua. Cukup sulit untuk menemukan mulut gua dan untuk melewatinya, karena mulut gua tersebut dulunya masih sempit, agar dapat masuk ke dalam gua cara melewatinya harus dengan memiringkan badan. Pada saat sudah berada di dalam gua, perasaan takut, cemas, dan was-was menyelimuti mereka. Keadaan gua yang gelap dan hanya disinari lampu petromak, mereka memberanikan diri untuk tetap melanjutkan penelusuran mereka. Liku-liku perjalanan di dalam gua pada waktu itu penuh perjuangan yang sangat luar biasa. Menipisnya oksigen di dalam gua



menjadi faktor penyebab kekhawatiran tersebut, karena lampu penerangan pun satu per satu mati selain itu membuat mereka cepat lelah. Dengan adanya semangat dari salah satu diantara mereka, akhirnya mereka tetap melanjutkan penelusuran gua dan dapat menemukan jalan keluar gua. Dalam melakukan penelusuran tersebut mereka memang menemukan sumber air di dalam gua dan cerita dari sepepuh mengenai bahayanya masuk ke gua itu hanya mitos, kenyataannya tidak terjadi apa-apa.

Setelah penelusuran gua, kemudian para penemu berdiskusi untuk memberi nama gua yang akhirnya diberi nama *Goa Gong*. Nama *Goa Gong* sendiri berkaitan dengan salah satu nama perangkat gamelan jawa yaitu *Gong*, sedangkan gunungnya bernama Gunung Gung-Gungan. Dahulu, gunung yang ada guanya tersebut sering terdengar suara seperti gamelan jawa dan suara-suara aneh lainnya. Selain itu juga di dalam gua terdapat batu yang jika dipukul mengeluarkan suara seperti alat gamelan jawa yaitu *gong*. Oleh karena itu, masyarakat Desa Bomo menamakan gua tersebut adalah *Goa Gong*.

Bagian dalam *Goa Gong* sendiri dibagi menjadi 7 ruang yang setiap ruangan tersebut diberi nama oleh orang terdahulu setelah gua ini dijadikan sebagai obyek wisata oleh masyarakat Bomo, nama ruangan tersebut dinamai sesuai dengan apa yang ada dan terjadi di tiap ruangan itu. Ruang pertama adalah ruang sendang Bidadari, sendang atau sungai kecil yang berada di dalam gua ini terdapat air yang bersih dan dingin. Menurut cerita masyarakat di sana ruangan tersebut diberi nama ruang sendang Bidadari karena dulu pernah ada wanita cantik mandi di sendang tersebut. Ruang kedua adalah ruang Bidadari, diberi nama seperti itu karena terdapat cerita bahwa di ruangan ini terkadang melintas

bayangan seorang wanita cantik. Masyarakat di sana juga mempercayai bahwa terdapat bayangan seorang wanita cantik, khususnya bagi mereka yang dapat melihatnya.

Kemudian ruang ketiga dan keempat adalah ruang kristal dan marmer, ruangan ini menyimpan batu kristal dan marmer yang berada di sisi-sisi dan samping gua. Ruang kelima adalah ruangan kosong yang cukup lebar dan menurut cerita dulu pernah dijadikan sebagai tempat konser musik 4 negara yaitu, Indonesia, Swiss, Inggris, dan Perancis. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mempromosikan keberadaan *Goa Gong* ke mancanegara. Selanjutnya adalah ruang keenam, ruangan ini merupakan ruang pertapaan. Banyak orang yang datang dari luar daerah seperti Ngawi, Tuban, Bojonegoro untuk bertapa. Biasanya tujuan mereka bertapa ini untuk mendapatkan ilmu spiritual, mereka yang melakukan hal tersebut bisa sampai 1-2 bulan di dalam gua. Terakhir ruang ketujuh yaitu ruang *batu gong*, di ruang ini terdapat batu yang jika di tabuh atau dipukul akan mengeluarkan suara seperti alat musik jawa yaitu Gong.

### **3.2 Goa Gong Menjadi Obyek Pariwisata**

Berdasarkan data yang diperoleh, dulu disaat 8 orang penemu menemukan gua, tidak terpikirkan bahwa gua yang mereka temukan nantinya akan dapat menjadi obyek wisata. Setelah mereka melakukan penelusuran gua, mereka melaporkan hal tersebut kepada kepala desa dan menceritakan semua apa yang terjadi dan apa yang mereka lihat di dalam gua. Kemudian kepala desa Desa Bomo pada saat itu melaporkan hal tersebut kepada pemerintah daerah bahwa terdapat gua di dalam gunung yang ada di Desa Bomo, akan tetapi laporan dari kepala desa tersebut tidak dianggap oleh pihak pemerintah karena tidak percaya



jika ada gua yang bagus di Desa Bomo. Akhirnya setelah laporannya tidak dianggap oleh pihak pemerintah, kepala desa dan para penemu berunding dan memberikan gagasan bahwa gua tersebut dijadikan sebagai obyek pariwisata dan dikelola oleh masyarakat Desa Bomo sendiri.

*“...dereng nggagas mbien mbak niki bakalan dados pariwisata, nggih namung laporan kalih kepala desa menawi gunung niko wonten guane sae. Akhire kepala desa laporan teng kabupaten tapi pak bupati piambak mboten nanggapi, tidak percaya nggih tidak percaya...”*

(Belum memikirkan dulu mbak ini akan jadi pariwisata, ya hanya laporan ke kepala desa kalau gunung di sana ada guanya bagus. Akhirnya kepala desa laporan ke kabupaten tapi pak bupati sendiri tidak menanggapi, tidak percaya.. ya tidak percaya) **Wawancara dengan Bapak Parlan, 07/04/2016 pukul 10.42 WIB.**

Sejak diputuskannya *Goa Gong* untuk dijadikan sebagai obyek pariwisata oleh Desa Bomo, masyarakat bergotong royong untuk membangun sarana-sarana pendukung seperti membuat jalan untuk menuju gua yang dibuat dari tumpukan batu dan ditata rapi sehingga dapat digunakan sebagai akses jalan, membersihkan sekitar gua dari tumbuhan-tumbuhan liar, melebarkan mulut gua agar dapat dimasuki dengan mudah oleh wisatawan, dan sebagainya. Setelah dirasa semuanya selesai, *Goa Gong* pun mulai dijadikan sebagai obyek wisata pada tahun 1996.

Pada saat itu pengelolaan *Goa Gong* dipegang oleh masyarakat Desa Bomo. Dari penjelasan Bapak Parlan (67 tahun) bahwa aktivitas kepariwisataan di *Goa Gong* pada tahun 1996 dijalankan oleh beberapa warga Desa Bomo yang telah ditentukan oleh pihak desa, tetapi tidak ada struktur organisasi pada saat itu, yang terpenting kepala desa sebagai penanggung jawab. Pada awal pembuatan infrastruktur untuk mendukung *Goa Gong*, mereka menggunakan uang kas desa dan bantuan dari masyarakat desa. *Goa Gong* berhasil menarik wisatawan yang

pada saat itu sistem masuk ke obyek wisata menggunakan kotak infaq, jadi wisatawan membayar tiket masuk secara sukarela. Kemudian mereka memanfaatkan dana hasil dari wisatawan datang mengunjungi *Goa Gong* untuk mengembangkan gua menjadi obyek wisata yang lebih baik lagi. Pada saat itu, respon wisatawan sangat baik khususnya wisatawan dari Pacitan sendiri.

Menurut Bapak Parlan (67 tahun), pengunjung *Goa Gong* saat itu sangat banyak dibandingkan dengan sekarang ini, hingga menyebabkan kemacetan. Hal itu terjadi dikarenakan pertama kalinya adanya wisata gua di Pacitan dan semua orang ingin melihatnya. Antusias masyarakat Pacitan sangat baik dengan berdirinya obyek wisata gua pada saat itu. Tetapi aktivitas pengelolaan *Goa Gong* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bomo hanya berlangsung selama satu tahun saja, selanjutnya pada tahun 1997 pengelolaan berganti dilakukan oleh pemerintah daerah, yang akan dibahas di sub bab selanjutnya.



**Gambar 3.1** Bagian dalam *Goa Gong*

### **3.3 Sistem Kepemilikan *Goa Gong***

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa *Goa Gong* ini ditemukan pada tahun 1995, tetapi pada saat itu belum ada perbaikan untuk bisa menjadi obyek pariwisata seperti sekarang ini. Meskipun *Goa Gong* ini ditemukan oleh



masyarakat Desa Bomo dan pada tahun 1996 sempat dikelola untuk dijadikan obyek pariwisata dan dapat dikatakan mampu menarik banyak wisatawan datang, pada akhirnya tahun 1997 pihak desa menyerahkannya kepada pemerintah daerah untuk mengelolanya. Hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan desa untuk mengembangkan *Goa Gong* sebagai obyek wisata, ketidakmampuan tersebut terjadi karena tidak adanya biaya untuk pembangunan *Goa Gong* menjadi lebih baik lagi. Seperti penjelasan Bapak Parlan:

*“Mbiyen niku desa mboten mampu ngelola mbak, misale nggae dalan, nggae tangga sing koyo ngunu mboten mampu. Opo neh pemikiran mbiyen mboten koyo saiki, nek pemikiran mbiyen koyo saiki mestine pihak desa bakal berusaha ngelola utawi ngembangne goa gong mbuh kui carane piye. Tapi yo mergo pikiran isek awam, terus kepala desane mbien yo setri sampun sepuh, dadine mboten enten pikiran ke sana”.*

(Dulu itu desa tidak mampu mengelola mbak, misalnya buat jalan, buat tangga yang seperti itu tidak mampu. Apalagi pemikiran dulu tidak seperti sekarang, kalau pemikiran dulu seperti sekarang pastinya pihak desa akan berusaha mengelola atau mengembangkan goa gong bagaimanapun caranya. Tapi ya karena pemikiran masih awam, lalu kepala desa dulu ya perempuan dan sudah tua, jadinya tidak ada pikiran ke sana) **Wawancara dengan Bapak Parlan, 07/04/2016 pukul 10.42 WIB.**

Setelah *Goa Gong* ini dijadikan sebagai obyek pariwisata oleh masyarakat Desa Bomo dan berhasil menarik wisatawan datang, pemerintah yang awalnya tidak menganggap bahwa gua tersebut memiliki potensi wisata kemudian datang ke *Goa Gong* untuk membuktikan kebenaran tersebut. Setelah mengetahui keadaan *Goa Gong* sempat ada perbincangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa agar gua ini dikelola oleh pemerintah daerah saja, tetapi pada saat itu pihak desa masih belum ada rencana untuk menyerahkan pengelolaan gua kepada pemerintah daerah karena pihak desa merasa bahwa dengan dijadikannya gua tersebut sebagai obyek wisata memberikan keuntungan kepada desa. Keuntungan tersebut adalah mereka merasa senang bahwa terdapat obyek wisata

di desanya. Beberapa bulan kemudian pihak desa merasa bahwa tidak mampu untuk mengelola dan mengembangkan *Goa Gong* karena terbatasnya biaya dan pemikiran masyarakat yang masih awam untuk mengembangkan *Goa Gong*.

Pak Parlan menjelaskan bahwa, jika saat itu mereka memiliki pemikiran untuk terus dapat mengelola dan mengembangkan *Goa Gong*, dengan membangun infrastruktur atau fasilitas pendukung yang sesuai standart kelayakan pariwisata seperti sekarang ini, mereka tidak akan menyerahkannya kepada pemerintah. Tetapi kenyataannya kondisi jalan yang baik, pencahayaan di dalam gua, area parkir, toilet, loket, *rest area* sebagian belum ada saat dikelola oleh masyarakat Desa Bomo. Saat dikelola masyarakat Desa Bomo keadaan *Goa Gong* tidak seperti sekarang ini, akses menuju tempat wisata ini pun sulit, bangunan toilet seadanya, pencahayaan seadanya, dan belum ada *rest area*. Dengan adanya kendala seperti itu untuk dapat mengembangkan *Goa Gong*, akhirnya masyarakat Desa Bomo memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah daerah pada tahun 1997 agar *Goa Gong* ini dapat menjadi obyek wisata yang lebih baik lagi dibandingkan saat pengelolaan dipegang oleh masyarakat Desa Bomo.

Pada tahun 1998 mulailah pemerintah daerah merintis *Goa Gong* untuk menjadi obyek pariwisata yang lebih baik dengan cara memberikan perubahan yang dapat menjadikan *Goa Gong* ini dapat menarik wisatawan lebih banyak lagi.

Di sisi lain, terdapat keunikan tersendiri dari sistem yang ada di *Goa Gong* yaitu kepemilikan gua. Sistemnya adalah pemilik gua-penemu gua-pemerintah daerah. Jadi pada intinya, *Goa Gong* ini bukanlah milik pemerintah daerah atau bukanlah aset daerah melainkan milik perseorangan yaitu milik Bapak Hari salah satu warga di Desa Bomo dan sampai saat ini pemerintah daerah dalam menjadikan



*Goa Gong* sebagai obyek wisata itu bersifat sewa atau menyewa lahan milik Bapak Hari dan lahan tersebut tidak dijual kepada pemerintah.

Setelah diputuskannya bahwa pemerintah daerah hanya boleh menyewa tidak boleh membelinya, pada saat itu terdapat sistem bagi hasil antara pemerintah daerah dengan pihak desa Bomo yaitu dengan perbandingan 70:30. Maksudnya adalah, jumlah penghasilan penjualan tiket masuk obyek wisata *Goa Gong* setiap bulannya 70% ke pemerintah daerah dan 30% masuk ke desa. Kemudian setelah desa mendapatkan 30% dari jumlah penghasilan *Goa Gong*, desa juga memikirkan pemilik dan penemu untuk membagi tersebut secara adil yaitu 10% ke desa dan 20% ke pemilik dan penemu *Goa Gong*. Penemu gua juga mendapatkan bagian dari penghasilan penjualan tiket masuk karena masyarakat Desa Bomo berpikir bahwa penemu merupakan sosok yang berjasa dalam hal ini, kalau tidak ada penemu pasti *Goa Gong* tidak akan menjadi obyek pariwisata.

Sistem bagi hasil seperti itu sudah cukup lama berjalan, akan tetapi menurut penjelasan Bapak Parlan mulai tahun 2015 dana tidak masuk ke desa. Kemudian akhirnya Bapak Parlan selaku orang yang juga sebagai penemu dengan kepala desa Bomo datang ke Dinas Pariwisata Pacitan untuk menanyakan hal tersebut.

Lalu pihak pemerintah daerah menanggapi pertanyaan tersebut dan ternyata ada perubahan mengenai sistem bagi hasil yang biasanya dilakukan bahwa pembagian 70:30 itu hilang dan sekarang diganti dengan sistem sewa tanah.

Dari penjelasan Bapak Parlan, pemerintah daerah membayar Rp 20.000.000 per bulan kepada Bapak Hari sebagai pemilik lahan dan itu merupakan keputusan antara pemilik lahan dan pemerintah daerah. Selain itu desa juga masih tetap mendapatkan hasil dari pihak *Goa Gong*, tetapi hanya 6% saja.

Sistem sewa lahan ini menurut salah satu penemu *Goa Gong* kurang sebanding dengan hasil yang didapatkan dari penjualan tiket masuk per bulannya.

Menurutnya terlalu sedikit karena harus dibagi dengan pemilik dan penemu, belum untuk membayar pajak.

*“...titik mbak, ora sebanding karo pendapatane Goa Gong sing akeh banget. Wong bendinane pengunjung akeh, kui wis piro pendapatane, tapi pemerintah nyewane mung rong puluh yuto per bulan nyang Pak Hari, kui ae iseh dibagi mbi penemu. Tapi yo piye neh mbak, wong kui wis keputusan Pak Hari ambek pemerintah, yo nek aku ke mung eman ae kok titik sewane ngunu lho mbak...”*

(sedikit mbak, tidak sebanding dengan pendapatan *Goa Gong* yang banyak sekali. Padahal sehari-harinya pengunjung banyak, itu sudah berapa pendapatannya, tapi pemerintah sewanya hanya dua puluh juta per bulan ke Pak Hari itu saja masih dibagi dengan penemu. Tapi ya mau bagaimana lagi mbak, kan itu sudah keputusan Pak Hari dengan pemerintah, ya kalau saya itu hanya sayang saja kok sedikit gitu lho mbak) **Wawancara dengan Tomi, 08/04/2016 pukul 13.12 WIB.**

Kemudian penemu dan pemilik gua berunding mengenai pembagian uang

Rp 20.000.000 hasil dari sewa, karena penemu tetap selalu terkait secara terus menerus untuk mendapatkan bagian atau menerima penghasilan. Dalam pembagian ini, pemilik tanah tetap mendapatkan bagian yang lebih besar daripada penemu yaitu senilai Rp 4.000.000, sisanya adalah Rp 16.000.000 dibagi ke 8 orang penemu gua yang setiap orang penemu mendapatkan Rp 2.000.000. Untuk pembayaran pajak, diserahkan kepada pemilik karena pemerintah hanya menyewa saja.

### **3.4 Upaya Pemerintah Daerah Terhadap *Goa Gong***

Setelah sistem pengelolaan *Goa Gong* dipegang oleh pemerintah daerah, kemudian pemerintah melakukan upaya untuk mengembangkan *Goa Gong* menjadi lebih baik lagi. Upaya tersebut diantaranya, pemerintah melakukan perbaikan dan pembangunan fasilitas atau infrastruktur di kawasan wisata guna



mendukung *Goa Gong* menjadi obyek wisata yang memiliki fasilitas sesuai standart kepariwisataan. Perbaikan dan pembangunan tersebut pemerintah lakukan di area dalam maupun luar gua, selain itu juga pemerintah melakukan perbaikan terhadap akses menuju *Goa Gong*. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan *Goa Gong* tidak sampai pada taraf perbaikan maupun pembangunan fasilitas saja, tetapi pemerintah daerah juga berupaya untuk menjadikan *Goa Gong* terkenal sampai ke mancanegara. Semua itu dilakukan pemerintah mulai dari *Goa Gong* dikelola pemerintah daerah hingga sekarang ini.

### 3.4.1 Perbaikan dan Pembangunan Fasilitas *Goa Gong*

Setelah *Goa Gong* sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah, secara bertahap pemerintah memberikan banyak perubahan terhadap *Goa Gong*, mulai dari pembangunan jalan, pembuatan jalur masuk, pembuatan tangga untuk akses masuk ke dalam gua, pencahayaan di dalam gua yang hal tersebut merupakan bagian penting guna mendukung keberadaan obyek wisata *Goa Gong*. Kemudian tahun-tahun berikutnya juga terus dirintis karena dulu wisatawan yang datang ke *Goa Gong* meningkat setiap tahunnya, dapat dikatakan setiap harinya selalu ramai pengunjung, tetapi ramainya aktifitas pengunjung dengan akses yang ada di *Goa Gong* tidak seimbang, karena fasilitas-fasilitas yang ada belum memenuhi standar, misalnya saja MCK, *rest area*, tempat parkir dan akses jalan yang belum begitu baik.

Menurut penjelasan dari Bapak Toni kepala UPT *Goa Gong*, pembangunan dapat dirasakan setelah ada kunjungan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian

perbaikan dilakukan secara cepat. Hasil dari perbaikan maupun pembangunan akses tersebut sudah lumayan banyak yang terlihat antara lain, adanya kipas angin besar di dalam gua, pencahayaan yang ada di dalam gua yang sekarang lampu untuk menyinari bagian dalam gua menggunakan lampu hias dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian terdapat program tugas pembantuan yaitu bantuan dari pemerintah pusat untuk revitalisasi Pasar Souvenir yang saat ini sudah berdiri hingga 3 lantai dan sudah tertata dengan baik. Selain itu juga ada revitalisasi *rest area* yang ada di luar gua, di sini *rest area* tidak hanya satu tempat saja tetapi juga ada di bagian tempat parkir yang sekarang juga sudah diperbaiki dan hasilnya dapat menampung kendaraan lebih banyak dibandingkan dengan yang dulu. Kemudian juga pemerintah melakukan pembangunan loket, yang berguna untuk mempermudah wisatawan untuk membeli tiket masuk. Pembangunan yang terakhir adalah pembangunan jembatan masuk ke *Goa Gong*, yang dapat memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk menuju ke pintu gua.

Pengelolaan yang dilakukan pemerintah dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur guna mendukung *Goa Gong* berhasil dalam meningkatkan jumlah wisatawan dan pendapatan setiap tahunnya. Maka dari itu, *Goa Gong* menjadi salah satu obyek pariwisata yang mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Berikut tabel jumlah peningkatan wisatawan dan pendapatan per tahun:



**Tabel 3.1 Data Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Obyek Wisata Goa Gong**

<b>Tahun</b>	<b>Wisatawan Mancanegara</b>	<b>Wisatawan Nusantara</b>	<b>Pendapatan</b>
2011	241 orang	138.036 orang	664.532.00
2012	255 orang	138.193 orang	675.409.400
2013	261 orang	138.200 orang	698.507.000
2014	374 orang	213.057 orang	1.018.060.800
2015	141 orang	218.842 orang	2.328.177.000

(Sumber: Data Disbuparpora Pacitan Tahun 2015)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah wisatawan dan pendapatan setiap tahunnya yang terus meningkat. Menurut penjelasan Bapak Toni Kepala UPT *Goa Gong*, peningkatan wisatawan yang datang ini dikarenakan kondisi gua yang semakin membaik. Infrastruktur yang telah dibangun seperti jalan menuju kawasan wisata yang dulu sempit dan terjal kini sudah beraspal memudahkan wisatawan untuk menuju ke *Goa Gong* dengan menggunakan transportasi besar seperti mobil dan bus. Kemudian area sekitar gua yang saat ini menjadi lebih baik dan menarik wisatawan untuk mendokumentasikan kegiatan berwisata mereka. Berikut beberapa infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk mendukung *Goa Gong* menjadi obyek pariwisata:



(a)



(b)

**Gambar 3.2 (a) Akses Jalan ke Goa Gong (b) Pasar Souvenir**



(a)



(b)

**Gambar 3.3 (a) Rest Area Goa Gong (b) Jembatan Menuju Gua**

### 3.4.2 Goa Gong Menjadi Geopark Internasional

Setelah pemerintah berhasil dalam mengelola dan mengembangkan obyek wisata *Goa Gong* menjadi lebih baik lagi dan memiliki fasilitas pendukung yang telah memenuhi standar, sentuhan lain yang diberikan pemerintah terhadap *Goa Gong* adalah menjadikan *Goa Gong* masuk dalam kawasan Geopark atau Taman Geologi. Geopark merupakan sebuah kawasan yang memiliki unsur geologi di mana masyarakat diajak untuk melindungi warisan alam yang termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya ([www.kanal.web.id](http://www.kanal.web.id)).

Kemudian pada tahun 2015 *Goa Gong* masuk dalam anggota GGN (*Global Geopark Network*) karena *Goa Gong* merupakan bagian dari Geopark Gunung



Sewu. GGN adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh UNESCO pada tahun 2004 untuk menampung anggota yang termasuk dalam situs Geopark.

Sebelum masuk GGN, *Goa Gong* masuk dalam kawasan wisata strategis nasional, dan di Indonesia hanya 5 provinsi yang masuk dalam kawasan wisata strategis nasional yang dinaungi oleh Kementerian Pariwisata dan di Jawa Timur ada 2 yaitu Bromo dan *Goa Gong*. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Toni:

*“Memang Goa Gong sekarang ini kan sudah masuk Geopark Internasional, di sisi lain memang sebelum masuk Geopark Internasional, Goa Gong ini masuk dalam kawasan wisata strategis nasional. Nah, di Indonesia hanya 5 provinsi yang masuk kawasan wisata strategis nasional yang dinaungi oleh Kementerian Pariwisata dan di Jawa Timur ini ada 2 yaitu di Gunung Bromo sama di Pacitan ini Goa Gong. Ya.. menurut saya tidak salah Goa Gong ini masuk dalam kawasan wisata strategis, mengapa? Ya karena keunikannya itu, sehingga pantas dijuluki gua yang indah se-Asia Tenggara”*  
**Wawancara dengan Bapak Toni, Kepala UPT Goa Gong, 3/4/2016 pukul 14.23 WIB.**

*Goa Gong* dapat masuk dalam GGN karena termasuk kawasan Gunung

Sewu. Gunung Sewu merupakan kawasan perbukitan yang membentang dari arah barat ke arah timur, antara Pantai Parangtritis di selatan Yogyakarta dan Teluk Pacitan, Jawa Timur. Disebut dengan Gunung Sewu karena bentang alamnya disusun oleh ribuan bukit kecil berbangun kerucut. Daerah Gunung Sewu termasuk dalam rangkaian pegunungan selatan yang berupa pematang perbukitan tinggi yang disusun oleh himpunan batuan tersier berfasies gunung api, turbidit, terobosan, dan karbonat (Samodra dalam Geomagz, 2015: 21). Dalam kaitannya dengan perkembangan bentang alam kars, Gunung Sewu adalah bentang alam yang berkembang pada batu gamping yang terbentuk 15 tahun hingga 3 juta tahun lalu di paparan laut dangkal yang sekarang tersingkap menempati Pegunungan Selatan (Samodra dalam Geomagz, 2015: 21).

Dalam konteks geopark, Gunung Sewu ini memiliki 30 situs geologi (*geosite*) yang tersebar di tiga wilayah. Pertama adalah wilayah barat yaitu di Gunung Kidul, Yogyakarta berupa Formasi Nglanggran, Formasi Sambipitu, Gua Pindul, Kali Suci, Luweng Jomblang, Pantai Siung-Wediombo, Lembah Sadeng, Air Terjun Bleberan, Pantai Baron-Kukup-Krakal, Luweng Cokro, dan Gua Ngingrong. Semua situs berkaitan dengan gunung api, gua, sungai, air terjun, dan pantai. Kedua adalah wilayah tengah yaitu di Wonogiri berupa Lembah Giritontro, Gua Sodong, Gua Tembus, Luweng Sapen, Gua Mrico, Gua Potro-Bunder, dan Pantai Sembukan. Situs geologinya terdiri dari lembah, gua, dan pantai. Ketiga adalah wilayah timur yaitu di Pacitan, Jawa Timur yang berupa Pantai Klayar, Pantai Buyutan, Pantai Watukarung, Pantai Srau, Pesisir Teluk Pacitan, *Goa Gong*, Goa Tabuhan, Luweng Jaran, Luweng Ombo, Song Terus, Danau Guyangwarak, dan Sungai Baksoka. Situs geologinya terdiri dari pantai, gua, sungai, dan telaga. Untuk *Goa Gong* dapat menjadi bagian dari Gunung Sewu karena *Goa Gong* memiliki ruangan besar di dalamnya yang berukuran panjang sekitar 100 meter, lebar 15-40 meter dan tinggi 20-50 meter yang dibentuk oleh proses pelarutan pada batu gamping Formasi Wonosari yang berumur 15 tahun hingga 3 juta tahun (Samodra dalam Geomagz, 2015: 22-24).

Kawasan Kars Gunung Sewu ini memiliki nilai strategis yang tinggi, sehingga pada tanggal 6 Desember 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan daerah tersebut sebagai kawasan ekokars. Kemudian pada tahun 2009, Kars Gunung Sewu selanjutnya dikelola secara berkelanjutan dalam kemasapan geopark (Alkantana dalam Geomagz, 2015: 28). Pada tanggal 13 Mei 2013, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pariwisata



dan Ekonomi Kreatif menetapkan Geopark Gunung Sewu yang diusulkan oleh forum kerjasama Pacitan-Wonogiri-Wonosari menjadi Geopark Nasional.

Pengesahan tersebut dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Juli 2013. Kemudian, Geopark Nasional Gunung Sewu dihantarkan kembali ke tingkat global, yaitu menjadi anggota Global Geoparks Network UNESCO pada tahun 2015 (Alkantana dalam Geomagz, 2015: 29).



## BAB IV

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA GOA GONG**

Pada bab ini akan menjelaskan analisis dan temuan data mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata *Goa Gong* yang akan dilihat dari perspektif pemerintah dan masyarakat. Maksud dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di sini adalah keterlibatan masyarakat pada struktur organisasi di dalam pengelolaan pariwisata *Goa Gong* yang hal itu berkaitan dengan kebijakan yang ada di obyek pariwisata tersebut. Selain itu juga akan membahas mengenai tujuan dari adanya kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan informal masyarakat di kawasan *Goa Gong*.

#### **4.1 Kebijakan Pariwisata di Pacitan**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, selain itu juga sebagai alat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata. Maka dari itu, untuk dapat mewujudkan hal tersebut perlu adanya suatu kebijakan sosial yang nantinya akan menyangkut kepentingan orang banyak dan itu adalah kebijakan publik. Di setiap daerah tentunya dalam suatu pemerintahannya terdapat kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk setiap program yang dilakukan atau dikelola. Seperti halnya di Kabupaten Pacitan sendiri yang salah satunya juga menerapkan suatu kebijakan dalam mengelola obyek



pariwisata, khususnya pada obyek pariwisata *Goa Gong*. Seperti yang dinyatakan oleh Goerge (2009) bahwa kebijakan adalah rencana aksi untuk memandu atau mempengaruhi tindakan dalam mengambil keputusan yang berlaku pada individu, kelompok, swasta dan organisasi sektor lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada di pemerintahan Kabupaten Pacitan dan hal itu juga diterapkan sebagai pedoman atau panduan dalam melaksanakan suatu program berdasarkan kebijakan yang ada.

Menurut Suharto (2008) kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan, kerangka kerja, petunjuk, rencana, peta atau strategi yang dirancang untuk menerjemahkan visi atau tujuan lembaga pemerintah dalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial. Di pemerintahan Kabupaten Pacitan sendiri khususnya pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga memiliki visi yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera Melalui Pariwisata Berbasis Kelestarian Alam, Budaya Lokal, Nilai Religi, Peran Serta Pemuda dan Olahraga yang Produktif, Prestatatif dan Inovatif”*, untuk dapat mewujudkan visi atau tujuan tersebut dibuatlah suatu misi yang digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, misi tersebut adalah:

1. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional
2. Melakukan optimalisasi pengelolaan aset seni budaya daerah, nilai tradisi, situs sejarah dan kepurbakalaan

3. Melakukan optimalisasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta pengembangan ekowisata berbasis pada ekonomi kerakyatan
4. Melakukan pengenalan potensi obyek dan daya tarik wisata serta potensi pendukung lainnya
5. Melakukan pembinaan dan pengembangan kreativitas serta peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan
6. Mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat

Selain itu suatu kebijakan menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat.

Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pemerintahan daerah sebagai pelaksana di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur (Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2014).



Kebijakan publik juga berhubungan dengan aktivitas kepariwisataan, karena di dalam pariwisata terkait dengan eksistensi kehidupan bersama masyarakat, khususnya masyarakat sekitar daerah wisata yang hal tersebut dikelola oleh pemerintah. Menurut Elliot (1997), dalam ranah pariwisata, peran pemerintah di sini bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur pariwisata, pemerintah juga memiliki otoritas kekuasaan untuk menjaga keamanan, membuat dan menetapkan aturan, serta memberikan dukungan dalam kegiatan kepariwisataan, selain itu juga memfasilitasi pariwisata dengan adanya penyediaan layanan dan pengawasan untuk menjamin bahwa kegiatan pariwisata tersebut memenuhi standar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di obyek wisata Pacitan. Dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah Kabupaten Pacitan mengacu pada kebijakan yang telah dibuat oleh negara yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 30 tentang kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam pasal 30 UU Nomor 10 Tahun 2009, pemerintah kabupaten/kota berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota, menetapkan daya tarik wisata kabupaten.kota, melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya, memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru, menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di

wilayahnya, menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Berdasarkan undang-undang di atas pemerintah daerah kemudian membuat aturan mengenai kepariwisataan di Pacitan. Aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Peraturan itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara memanfaatkan kekayaan daerah yang ada berupa tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga serta menyediakan fasilitas pendukungnya. Peraturan daerah tersebut berlaku pada semua obyek wisata di Pacitan, termasuk obyek wisata *Goa Gong*

Dalam pengelolaan *Goa Gong*, obyek wisata ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan. UPTD *Goa Gong* telah membuat dan menetapkan aturan sebagai tugas mereka dalam pengelolaan obyek wisata *Goa Gong* yang diantaranya adalah:

1. Menyusun kebutuhan dan pengadaan sarana admistrasi barang-barang keperluan unit pengelola obyek wisata gua
2. Melaksanakan pemeliharaan, menjaga keamanan dan kelestarian obyek wisata, benda-benda, fasilitas dan sumber daya alam sekitarnya yang menjadi kewenangannya
3. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penjualan karcis retribusi masuk sampai penyeteroran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pelayanan pengunjung dengan sebaik-baiknya



4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelola obyek wisata gua

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain membuat dan menetapkan aturan yang dilaksanakan untuk mengelola *Goa Gong*, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur guna mendukung *Goa Gong* sebagai obyek pariwisata. Setelah *Goa Gong* diserahkan kepada pemerintah daerah oleh pihak Desa Bomo yang dikarenakan ketidakmampuan pihak desa dalam mengelola atau mengembangkan menjadi lebih baik lagi, pemerintah daerah mulai untuk membenahi atau membangun infrastruktur untuk mendukung *Goa Gong* sebagai obyek wisata sesuai standar kelayakan. Pada saat itu, pemerintah mulai membangun jalan menjadi aspal yang sebelumnya hanya tumpukan batu dan tanah untuk memudahkan wisatawan yang datang, kemudian membangun toilet, loket masuk, jembatan untuk jalur masuk ke gua, tempat parkir dan pasar souvenir. Selain itu pemerintah daerah juga berusaha untuk menjamin bahwa kegiatan pariwisata itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan cara membangun Pasar Souvenir yang dikhususkan untuk tempat berjualan masyarakat sekitar kawasan *Goa Gong*.

Selain kebijakan yang sudah dijelaskan di atas, terdapat kebijakan lain lagi yang ada di obyek wisata *Goa Gong*. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai sistem kepemilikan *Goa Gong* bahwa *Goa Gong* ini bukanlah milik pemerintah atau aset negara maupun milik desa, tetapi milik

perseorangan yang tidak lain adalah warga Desa Bomo. Agar *Goa Gong* ini tetap menjadi obyek wisata, pemerintah daerah mengelolanya dengan cara sistem sewa. Sebenarnya, dalam sistem sewa yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemilik gua ini terdapat surat perjanjian kontrak yang bertujuan agar pengelolaan *Goa Gong* berjalan dengan baik. Tetapi dalam hal ini penulis tidak bisa mendapatkan surat perjanjian tersebut sebagai bukti karena terdapat batasan antara penulis dengan pemerintah. Selain itu juga karena dokumen tersebut bersifat rahasia, sehingga dokumen tersebut hanya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah.

Selain itu juga dalam pengelolaan obyek wisata *Goa Gong* ini terdapat perjanjian kerjasama antara Disbudparpora Pacitan dengan pengelola parkir obyek wisata *Goa Gong* yang tidak lain adalah warga Desa Bomo. Maksud dari surat perjanjian tersebut adalah tentang pengelolaan parkir obyek wisata *Goa Gong* yang telah dibuat pada tanggal 2 Januari 2013. Kerjasama tersebut dilakukan salah satunya untuk memberdayakan masyarakat Desa Bomo dengan cara menyerahkan pengelolaan parkir kepada warga desa yang sudah ditentukan. Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam pengelolaan adalah 3 warga Desa Bomo, dan telah disetujui oleh pemerintah daerah. Tugas mereka adalah mengelola parkir dan berkewajiban menyetorkan uang kontrak kelola seluruh pendapatan setiap bulan kepada pemerintah. Dengan adanya kerjasama seperti itu diharapkan obyek wisata *Goa Gong* ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

#### **4.2 Tujuan Kebijakan Pariwisata Untuk Masyarakat**

Setiap obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah idealnya memiliki suatu tujuan kebijakan sebagai pedoman dalam melakukan program-



program pengembangan obyek wisata. Church (2004) dalam (Goerge, dkk, 2009: 200) berpendapat bahwa ada tiga tujuan utama dari kebijakan pariwisata dalam tingkat lokal dan regional, yaitu diversifikasi ekonomi, pembaharuan ekonomi, dan untuk mengatasi perpecahan sosial.

#### 4.2.1 Diversifikasi Ekonomi

Tujuan kebijakan pariwisata dalam hal diversifikasi ekonomi, merupakan penganekaragaman usaha untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan masyarakat Desa Bomo mayoritas ada pada sektor pertanian. Mayoritas masyarakat Desa Bomo bekerja sebagai petani, selain satu jenis pekerjaan tersebut terdapat pekerjaan lain sebagai selingan mereka dalam sektor pariwisata. Melalui penciptaan peluang kerja di bidang pariwisata, masyarakat memiliki pekerjaan sampingan. Peluang tersebut dapat berupa sesuatu yang menunjang pariwisata, misalnya membuka lapak di Pasar Souvenir, menawarkan jasa senter, payung serta sebagai pemandu wisata, dan tukang ojek yang semuanya berkaitan dengan pariwisata.

Kaitannya dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki kebijakan dalam ranah pariwisata yang tujuannya mengarah pada diversifikasi ekonomi pada masyarakat sekitar. Pemerintah menghimbau agar masyarakat yang berada di kawasan wisata khususnya *Goa Gong* agar dapat memanfaatkan adanya obyek wisata sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, kegiatan masyarakat Desa Bomo seperti berdagang dan menawarkan jasa ini merupakan suatu bentuk keterlibatan mereka dalam obyek pariwisata *Goa Gong* secara informal. Secara kasatmata masyarakat Desa Bomo terlihat terlibat dalam pengelolaan *Goa Gong*, akan tetapi yang terjadi di sana masyarakat hanya dapat

memanfaatkan dari adanya obyek wisata tersebut. Masyarakat tidak terlibat dalam struktur kepengurusan pengelolaan *Goa Gong*, tetapi pemerintah menggunakan cara lain sebagai upaya dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat melalui pariwisata. Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan *Goa Gong* adalah:

#### 4.2.1.1 Membuka Lapak di Pasar Souvenir

Di dalam kawasan *Goa Gong*, terdapat bangunan khusus yang dibangun untuk wisatawan yang ingin mendapatkan cinderamata sebagai kenang-kenangan maupun buah tangan, bangunan tersebut adalah Pasar Souvenir. Pasar Souvenir berada di samping gua yang merupakan akses keluar dan selalu dilewati wisatawan untuk menuju pintu keluar setelah menikmati keindahan alam di dalam gua. Wisatawan akan dipertemukan dengan para penjual yang menjajakan berbagai jenis makanan, minuman, buah tangan, cinderamata atau oleh-oleh khas Pacitan. Pasar Souvenir ini memang dikhususkan untuk para penjual yang berjualan di sekitar *Goa Gong* dan para penjual tersebut mayoritas adalah masyarakat Desa Bomo. Menurut penjelasan Bapak Joan selaku staff di kantor Desa Bomo, masyarakat yang berjualan di dalam *Goa Gong* berjumlah 88 orang. Pemerintah daerah membangun Pasar Souvenir ini untuk mendukung kelayakan *Goa Gong* sebagai obyek pariwisata, dan biasanya masyarakat yang ingin berjualan di Pasar Souvenir harus menyewa lapak seharga Rp 100.000 per bulan, tetapi juga ada tempat di luar Pasar Souvenir yang biasanya penjual menyewa lapak seharga Rp 25.000 per bulan.

*“Pasar Souvenir itu kita buat agar Goa Gong ini layak sebagai obyek pariwisata, apalagi Goa Gong kan sudah jadi geosite-nya Geopark Internasional. Selain itu juga sebagai bentuk penertiban kepada mereka*



yang ingin berjualan agar tidak mengganggu, tidak seenaknya sendiri. Makanya kita buat itu, pedagang kita jadikan satu supaya rapi dan memudahkan wisatawan kalau pengen beli makan, beli cinderamata, kan disawang yo penak to nek rapi ora mrono-mrono (kan dilihat ya enak kalau rapi tidak kemana-mana)". **Wawancara dengan Bapak Toni, Kepala UPT Goa Gong, 2/5/2016 pukul 09:48 WIB.**

Ber macam-macam barang yang dijual oleh masyarakat di sana. Ada makanan khas Pacitan seperti kripik pisang, sale pisang, kripik singkong, kemudian pakaian, aksesoris dari batu mulia, akik dan masih banyak lagi. Sehari-harinya, Pasar Souvenir ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan apalagi di saat liburan wisatawan yang datang melebihi hari-hari biasanya. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi mereka yang berjualan. Seperti Ibu Wati (41 tahun) yang berjualan makanan khas Pacitan, yaitu cemilan atau makanan ringan. Beliau mendapatkan barang dagangannya dari temannya yang memiliki industri rumah tangga membuat makanan ringan khas Pacitan. Ibu Wati sudah 10 tahun lebih berjualan di sekitar *Goa Gong* dan menurut beliau penghasilan yang didapatkan sangat lumayan, dapat membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sebelum Ibu Wati berjualan di kawasan *Goa Gong*, beliau berjualan di pasar. Dulu Ibu Wati hanya mengandalkan hasil alam untuk dijual seperti, singkong, kelapa, daun singkong, kacang tanah, dan pisang, yang hal itu membuat dirinya dan keluarganya harus mencari cara lain untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya dulu beliau dan suaminya menjadi buruh tani ke sawah orang jika musim panen padi. Jika dibandingkan sekarang, beliau merasakan kehidupan yang lebih baik di saat dia telah berjualan di *Goa Gong*, karena menurutnya berjualan di sini beliau akan mendapatkan

penghasilan tetap yang lumayan dibandingkan dengan dulu saat berjualan di pasar.

Biasanya Ibu Wati mendapatkan penghasilan minimal Rp 50.000 sehari, bisa lebih mencapai Rp 100.000 – Rp 200.000 jika di hari liburan karena wisatawan yang banyak datang ke *Goa Gong*. Ibu Wati biasanya juga membayar sewa lapak ke pihak *Goa Gong* seharga Rp 100.000 per bulan agar beliau tetap bisa berjualan di sana. Menurut beliau berjualan di sekitar *Goa Gong* sangat berpengaruh baik dalam kehidupannya, beliau dapat membantu suaminya untuk menyekolahkan anak-anaknya, mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan bisa menabung. Beliau sangat bersyukur dengan adanya wisata ini karena dapat membantunya dalam memperbaiki perekonomian keluarganya.

Begitu juga dengan Ibu Miati (49 tahun), beliau warga Desa Bomo yang berjualan makanan seperti soto, nasi campur, gado-gado, dan minuman. Di saat *Goa Gong* dijadikan obyek pariwisata beliau belum berjualan di sana. Sebelumnya beliau merantau ke Jakarta bersama suaminya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sedangkan suaminya bekerja di pabrik dan ia harus meninggalkan anaknya di rumah bersama neneknya. Kemudian di tahun 2000an beliau kembali ke rumah dan berencana untuk berjualan makanan di *Goa Gong*.

Hampir sama dengan Ibu Wati, Ibu Miati juga merasakan perubahan dalam hal perekonomian di keluarganya. Semenjak berjualan di *Goa Gong* dan suaminya juga sebagai tukang ojek di sekitar gua, beliau tidak lagi merasa kekurangan seperti dulu yang harus merantau demi mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian menurut beliau, dengan adanya ia dan warga lain berjualan di sini memudahkan



wisatawan yang berkunjung jika mereka merasa lapar atau lelah untuk mendapatkan makanan. Selain itu juga orang-orang yang berjualan di sini dapat dikatakan sebagai pelengkap dan pendukung *Goa Gong* sebagai obyek pariwisata.

#### 4.2.1.2 Jasa Senter, Payung dan Pemandu Wisata

Selain berjualan, masyarakat di Desa Bomo juga memanfaatkan keberadaan *Goa Gong* dengan cara yang lain, yaitu menyewakan senter, payung, dan sebagai pemandu wisata. Jasa senter dan payung memang sangat bermanfaat bagi para wisatawan. Dengan keadaan dalam gua yang tidak terlalu terang meskipun terdapat penyinaran dari lampu yang sudah dipasang oleh pihak pengelola gua, tetapi penerangan lampu senter pun masih dibutuhkan untuk membantu wisatawan dalam menelusuri gua. Begitu juga dengan jasa payung, di dalam gua selalu terdapat tetesan-tetesan air dari atas gua, sehingga payung sangat berguna untuk wisatawan agar tidak basah terkena tetesan air tersebut.

Dari pengamatan penulis, cukup banyak warga Desa Bomo yang menawarkan jasa senter maupun payung, dan mayoritas adalah ibu-ibu yang tentunya ingin juga mendapatkan penghasilan dari jasanya menyewakan senter dan payung kepada wisatawan. Harga sewa senter dan payung dipatok Rp 5.000 saja, biasanya mereka berada di depan mulut gua sambil mendatangi wisatawan yang datang menawarkan jasanya.

Salah satu masyarakat Desa Bomo yang bekerja sebagai jasa senter dan payung adalah Ibu Siti (38 tahun). Beliau merupakan warga asli Desa Bomo yang sudah menikah dan memiliki dua orang anak. Ibu Siti bekerja sebagai jasa senter dan payung di *Goa Gong* sudah sejak tahun 2012. Beliau bisa bekerja di *Goa*

*Gong* karena diajak salah satu warga Desa Bomo yang juga bekerja di sana. Selain itu Ibu Siti juga ingin membantu suaminya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sehari-hari Ibu Siti tidak hanya bekerja sebagai jasa senter dan payung tetapi beliau kadang-kadang juga bekerja sebagai penjahit di rumahnya. Tetapi jika beliau tidak ada orderan menjahit, beliau menawarkan senter dan payung di *Goa Gong*. Biasanya Ibu Siti mendapatkan penghasilan minimal Rp 25.000 sehari, bisa lebih mencapai Rp 50.000 jika di hari liburan karena wisatawan yang banyak datang ke *Goa Gong*. Menurut beliau bekerja di *Goa Gong* sebagai penyewa senter dan payung ini lumayan berpengaruh dalam kehidupannya, karena beliau dapat membantu suaminya bekerja.

Kemudian untuk pemandu wisata biasanya diartikan sebagai seseorang yang menemani perjalanan dan memberikan informasi kepada wisatawan terkait dengan obyek wisata yang dikunjungi, dan pemandu wisata ini juga dari warga Desa Bomo sendiri, tetapi yang menjadi pemandu adalah laki-laki karena dirasa cukup kuat untuk mengantarkan wisatawan menelusuri gua yang memang jalan di dalam gua cukup sempit, sulit dan naik turun. Biasanya jika menyewa jasa pemandu, pemandu tidak mematok harga tetapi wisatawan memberikan persenan seikhlasnya saja. Hasil dari itu semua dirasa cukup untuk membantu perekonomian

#### **4.2.1.3 Paguyuban Ojek Goa Gong**

Paguyuban Ojek *Goa Gong* ini merupakan nama komunitas ojek yang berada disekitar obyek wisata *Goa Gong*. Paguyuban ojek ini ada sejak tahun 2014 yang dilatarbelakangi banyaknya tukang ojek yang ada di sekitar kawasan gua yang dulu masih berpencar sendiri-sendiri, maka dari itu Bapak Tomi dan



beberapa tukang ojek lain berdiskusi untuk membuat komunitas ojek yang akhirnya disetujui dengan tukang ojek lainnya. Kemudian komunitas ojek tersebut diberi nama Paguyuban Ojek *Goa Gong* yang di ketuai oleh Bapak Tomi. Uniknya tukang ojek di sana harus memakai baju yang telah diseragamkan dengan warna yang terang yaitu warna *orange* karena untuk menunjukkan identitas mereka bahwa mereka adalah anggota dari paguyuban ojek. Tukang ojek di sana biasanya menunggu wisatawan di tempat parkir dan menawarkan jasanya kepada wisatawan untuk diantar ke pintu loket agar wisatawan tidak merasa lelah jika harus berjalan dari tempat parkir menuju ke loket.

Anggota dari Paguyuban Ojek *Goa Gong* ini cukup banyak lebih dari 30 anggota dan mayoritas warga Desa Bomo meskipun juga ada dari desa lain. Harga yang dipatok untuk menggunakan jasa ojek sejumlah Rp 5.000 sekali jalan. Menurut salah satu anggota paguyuban ojek tersebut yaitu Bapak Agus (38 tahun), dengan adanya ojek-okek di sini diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan karena jika wisatawan ada yang lelah atau malas untuk berjalan, mereka bisa menggunakan jasa ojek untuk mengantarnya. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai pelengkap fasilitas *Goa Gong* meskipun paguyuban ojek ini bukan program kerja pemerintah daerah melainkan inisiatif tukang ojek sendiri.

Jadi, kegiatan masyarakat seperti berjualan dan menawarkan jasa di sekitaran obyek wisata *Goa Gong* ini merupakan bentuk dari tujuan pemerintah dalam diversifikasi ekonomi. Dengan mereka berjualan dan menawarkan jasa, setidaknya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam sehingga hal tersebut dapat mengatasi krisis ekonomi.

#### 4.2.2 Pembaharuan Ekonomi

Tujuan kebijakan dalam hal pembaharuan ekonomi, peran pemerintah dalam menciptakan tempat tujuan wisata yang baru sangat diperlukan, yang paling penting adalah pengembangan infrastruktur wilayah pariwisata. Selain itu pemerintah juga diharapkan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar kawasan pariwisata agar dapat terbuka dan ikut serta menjaga kenyamanan daerah wisata. Dalam hal pembaharuan ekonomi di ranah pariwisata, pemerintah akan mengoptimalkan peran serta masyarakat di sekitar pariwisata, misalnya pelaku seni di daerah setempat agar dapat mempertahankan tradisi yang ada, kemudian makanan khas atau produk khas daerah sehingga akan menjadi industri khas daerah yang itu semua bertujuan untuk memberikan dampak positif dari adanya pariwisata untuk perekonomian masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam hal ini berupaya melakukan pembaharuan ekonomi kepada masyarakat Pacitan. Salah satunya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Pacitan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berkaitan dengan pariwisata, masyarakat dihimbau untuk dapat menjadi pelaku UMKM seperti industri olahan ikan, industri olahan kayu, industri batu mulia yang itu semua dapat dijadikan sebagai khas daerah disaat wisatawan datang berwisata di Kabupaten Pacitan. Dalam hal ini pemerintah tidak serta merta menyuruh masyarakat untuk berwirausaha, tetapi pemerintah daerah selalu



memberikan penyuluhan dan pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai hal tersebut.

Menurut pemerintah daerah, bahwa UMKM yang ada di Kabupaten Pacitan ini memiliki peran penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai pendukung upaya peningkatan ekspor non migas, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Pacitan, sehingga mampu meningkatkan kedudukan dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun pemerintah daerah berupaya memberdayakan UMKM di daerah Pacitan, tetapi pemberdayaan UMKM belum berjalan secara menyeluruh di daerah Pacitan, salah satunya di daerah Desa Bomo. Meskipun Desa Bomo merupakan daerah kawasan wisata, tetapi upaya pemerintah daerah dalam pembaharuan ekonomi belum terlaksana di sana. Pemerintah lebih condong kepada bentuk penganekaragaman usaha yang ditujukan kepada masyarakat Desa Bomo. Meskipun demikian, pemerintah masih berusaha untuk tetap mengembangkan program-program yang berkaitan dengan pariwisata untuk tetap mensejahterakan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Bomo.

#### **4.2.3 Mengatasi Perpecahan Sosial**

Tujuan kebijakan pariwisata dalam mengatasi perpecahan sosial dijadikan sebagai acuan pengembangan pariwisata yang nantinya akan dapat mengatasi timbulnya konflik. Hal tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan dampak yang justru merugikan bagi pengembangan pariwisata. Selain itu konflik nantinya dapat

berdampak pada pertumbuhan ekonomi setempat, sehingga kebijakan harus ada dalam setiap kegiatan kepariwisataan.

Salah satu bentuk atau cara pemerintah dalam mengatasi perpecahan sosial dalam kawasan wisata *Goa Gong* yaitu dengan membuat perjanjian kontrak mengenai sistem sewa lahan yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemilik.

Sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa sistem kepemilikan gua ini merupakan milik perseorangan yang merupakan salah satu warga Desa Bomo. Pemerintah daerah melakukan sistem sewa karena gua tersebut tidak dijual oleh pemiliknya, sehingga pemerintah daerah melakukan perjanjian dan membuat kontrak dengan pemilik. Hal tersebut dilakukan karena untuk jaga-jaga jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan yang nantinya dapat menimbulkan masalah dan membuat sistem pengelolaan *Goa Gong* menjadi rumit. Selain itu dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, maka masyarakat menjadi lebih mendukung pengelolaan *Goa Gong* agar menjadi obyek wisata yang lebih baik.

#### **4.3 Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Wisata *Goa Gong***

Kegiatan kepariwisataan biasanya melibatkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan pariwisata dalam pengelolaan karena secara tidak langsung masyarakatlah yang mengerti akan situasi di lingkungan mereka. Hal tersebut tidak terlihat pada kegiatan kepariwisataan di *Goa Gong*, yang artinya masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan obyek wisata tersebut. Secara formal masyarakat tidak terlibat dalam struktur kepengurusan pengelolaan *Goa Gong* yang dijalankan oleh pemerintah daerah, tetapi secara informal masyarakat terlibat dalam kegiatan yang mendukung *Goa Gong* sebagai obyek pariwisata yaitu berdagang dan menawarkan jasa di kawasan wisata.



Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat dua perspektif untuk melihat sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengelolaan *Goa Gong*. Keterlibatan masyarakat *Goa Gong* dapat dilihat secara formal dan informal. Secara formal yaitu sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang sah, menurut pemerintah daerah masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan. Masyarakat tidak bisa begitu saja dilibatkan dalam struktur pengelolaan *Goa Gong*, tetapi masyarakat hanya dapat terlibat secara informal saja atau melakukan kegiatan di luar struktur pengelolaan gua seperti berdagang dan menawarkan jasa di kawasan *Goa Gong*. Masyarakat juga menyatakan demikian, bahwa masyarakat tidak merasa bahwa mereka terlibat dalam pengelolaan. Mereka juga merasa bahwa mereka tidak diajak dalam pengelolaan gua oleh pemerintah. Menurut mereka kegiatan seperti berdagang dan menawarkan jasa yang mereka lakukan ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat mendukung keberadaan *Goa Gong* sebagai obyek wisata dan sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.

Secara umum masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan suatu obyek pariwisata, karena merekalah yang lebih memahami situasi di sekitar obyek pariwisata. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan sampai dengan implementasi dalam pengelolaan pariwisata sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pariwisata tersebut bermanfaat bagi masyarakat lokal dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa dukungan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan, implementasi sampai pengawasan dalam pengembangan pariwisata kemungkinan akan menghadapi kesulitan (Timothy, 2003: 5). Pada kenyataannya, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di obyek wisata *Goa Gong*. Pelibatan masyarakat dalam tahap-tahap yang

sesuai kebijakan tidak ada di sini. Padahal keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan merupakan hal yang terpenting di saat terdapat keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu dan mengerti apa yang dibutuhkan, dan paham akan situasi di sekitar. Tujuan pariwisata yang sebenarnya pada dasarnya akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengelolaan dan pengembangan, mulai dari tahap perencanaan, implementasi atau pelaksanaan hingga pada tahap pengawasan program yang dibuat, akan tetapi tidak di obyek wisata *Goa Gong*.

Dalam tahap perencanaan, seperti rapat dalam perumusan kebijakan atau pembuatan program-program kegiatan, keterlibatan masyarakat sangat berperan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan maupun pengembangan pariwisata. Fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Bomo menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mengaku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari kepala UPTD obyek wisata *Goa Gong*. Dalam pengelolaan obyek pariwisata di Pacitan, ada beberapa obyek wisata yang memang segala hal yang berkaitan dengan kebijakan, perumusan kebijakan, tahapan-tahapan kebijakan hanya tergantung dan dikelola oleh pemerintah daerah. Obyek pariwisata tersebut antara lain, *Goa Gong*, *Klayar*, *Banyu Anget*, dan masih banyak lagi. Masyarakat Desa Bomo juga merasa tidak pernah diundang dalam pertemuan di desa yang membahas mengenai pengembangan *Goa Gong* meskipun hal tersebut ada atau tidak, mereka juga tidak mengetahuinya. Masyarakat di sana merasa bahwa mereka sudah tidak lagi memiliki hak dalam *Goa Gong* ini, karena mengingat bahwa sekarang ini



*Goa Gong* bukan lagi milik desa seperti dulu yang didirikan oleh masyarakat sendiri dan dikelola sendiri.

Menurut Kepala UPTD *Goa Gong*, hal tersebut merupakan salah satu alasan masyarakat Bomo tidak bisa terlibat dalam tahap perencanaan pengelolaan obyek wisata tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, mengenai adanya sistem kepemilikan gua ini membuat masyarakat tidak bisa terlibat dalam pengelolaan. Pemerintah bukanlah pemilik gua justru gua tersebut milik perseorangan dan tentunya bukan milik masyarakat. Apalagi sekarang ini *Goa Gong* sudah di kelola oleh pemerintah daerah dengan adanya perjanjian kontrak antara pemerintah dan pemilik gua, sehingga status pemerintah di sini adalah menyewa gua yang dijadikan sebagai obyek pariwisata. Menyewa di sini diartikan pemerintah daerah menyewa gua kepada pemilik gua yaitu perseorangan, bukan kepada masyarakat umum, bukan juga kepada pemerintah desa. Secara otomatis kebijakan yang terkait pengelolaan dan pengembangan *Goa Gong* mutlak di tangan pemerintah dengan pemilik gua, sehingga masyarakat Bomo tidak memiliki hak untuk ikut dalam perencanaan pengelolaan.

Kemudian pada tahap implementasi atau pelaksanaan hasil perencanaan kebijakan, untuk melihat keterlibatan masyarakat Bomo dalam tahap ini dapat dilihat melalui keterlibatannya secara informal dalam pengelolaan usaha-usaha di sekitar kawasan obyek wisata *Goa Gong*. Meskipun masyarakat tidak memiliki hak dalam pengelolaan gua, tetapi masyarakat Bomo masih bisa untuk masuk melakukan kegiatan ekonomi yaitu berdagang maupun menawarkan jasa. Selain itu ada seorang warga Bomo yang direkrut sebagai pegawai tetap di *Goa Gong* yaitu anggota pengelola *Goa Gong*. Hal tersebut bisa terjadi karena dulu disaat

awal *Goa Gong* pindah pengelolaannya ke pemerintah daerah. Bapak Parlan beserta teman-temannya yang lain berdiskusi dengan kepala desa untuk memasukkan remaja desa di Desa Bomo untuk bekerja di *Goa Gong*. Hingga akhirnya ada 4 orang yang mau bekerja di sana dan mereka magang selama 8 tahun agar bisa menjadi pegawai tetap. Kemudian setelah 4 orang tersebut menjadi pegawai tetap, 2 orang dipindah ke Pantai Klayar, 1 orang ke *Goa Tabuhan*, dan tinggal 1 orang yang masih tetap di *Goa Gong*. Hal tersebut tentunya dilaksanakan sesuai hasil dari perencanaan atau pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah daerah. Jadi, masyarakat hanya dapat menerima dan melaksanakan keputusan dari pemerintah daerah tanpa ikut terlibat di dalamnya.

Hal tersebut dirasa tidak membebani masyarakat Desa Bomo, kebanyakan mereka lebih senang menerima keputusan pemerintah daerah dibandingkan dengan ikut serta dalam perencanaan, karena pemikiran mereka yang mengira bahwa terlibat dalam pengelolaan maupun pengembangan pariwisata itu sulit dan rumit jauh dari jangkauan berpikir mereka, bahkan ada diantara mereka yang tidak berminat dalam pengelolaan *Goa Gong*. Selain itu juga karena mereka berpikir bahwa hal tersebut bukanlah tugas mereka lagi melainkan tugas pemerintah daerah dan yang terpenting keberadaan *Goa Gong* ini bermanfaat bagi mereka dan dapat mencari uang lewat adanya wisata tersebut untuk mencukupi kehidupan mereka.

Pada tahap pengawasan atau evaluasi program yang dilaksanakan, pada dasarnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan pariwisata memiliki peran kontrol yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan obyek pariwisata, karena pengawasan ini berkaitan dengan tahap perencanaan atau pengambilan keputusan



yang seharusnya masyarakat juga terlibat. Jadi mereka nantinya akan mengetahui jika ada kegagalan atau hal yang tidak diinginkan dalam pengelolaan.

Keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam tahap pengawasan di obyek wisata *Goa Gong* tidak terlalu dominan. Dari penjelasan Kepala UPTD *Goa Gong*, pengawasan dalam pengelolaan ini juga sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu mereka yang berada di bidang UPTD *Goa Gong*.

Pemerintah melakukan pengawasan secara formal yang tentunya dari pengawas internal maupun eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat, sedangkan masyarakat Bomo tidak terlalu dominan akan tetapi pemerintah tetap menerima kritik dan saran sebagai evaluasi dan kemandirian dalam pengelolaan *Goa Gong*. Jadi masyarakat tidak bisa seenaknya sendiri untuk terlibat dalam pengawasan, karena jika terlalu masuk ke tahap ini harus dilihat terlebih dahulu kapasitasnya seperti apa.

Dari masyarakat Desa Bomo juga menyatakan demikian, bahwa dalam tahap pengawasan ini mereka hanya ikut membantu dalam mengawasi sekitaran gua jika ada yang mencurigakan. Misalnya ada orang yang tidak dikenal datang ke gua pada waktu *Goa Gong* sudah tutup. Mereka biasanya langsung mendatangi orang tersebut dan menanyakan maksud tujuannya. Apalagi sampai saat ini masih banyak orang dari luar daerah Pacitan datang ke *Goa Gong* untuk bertapa, masyarakat Desa Bomo masih ikut mengawasi dalam hal-hal seperti itu. Mereka juga tidak mau disalahkan jika terjadi kerusakan dalam kawasan gua, sehingga masyarakat hanya mampu terlibat sekedar itu saja dan tidak berani masuk terlibat terlalu dalam, mengingat bahwa *Goa Gong* kini bukan milik desa lagi dan mereka

menyadari akan posisi mereka sehingga mereka tahu dalam menempatkan diri mereka sendiri.

Dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semuanya masyarakat yang berada di kawasan wisata memiliki peluang yang besar untuk terlibat dalam pengelolaan suatu obyek pariwisata. Meskipun Timothy (2003: 6) menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat membantu bagi pembangunan nasional yang lebih baik dalam jangka panjang, tapi yang terjadi pada pariwisata *Goa Gong* tidak demikian. Pemerintah daerah merasa tidak memerlukan keterlibatan masyarakat dalam hal ini, karena pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk *Goa Gong* harus mengacu pada ukuran secara nasional, mengingat bahwa *Goa Gong* saat ini telah menjadi Geopark Internasional.

Kemudian Timothy (2003: 6) menyatakan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk membantu melindungi dan melestarikan sosial budaya, sejarah dan sumber daya alam yang penting dalam lingkup pariwisata dan pada akhirnya dapat meningkatkan rasa saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat lokal dengan membangun pemahaman yang lebih baik diantara mereka. Hal tersebut tidak demikian bagi seluruh masyarakat Desa Bomo, menurut salah satu warga Bomo, bahwa memang masyarakat harus menjaga kelestarian alam disekitarnya yang salah satunya dijadikan obyek pariwisata, tetapi kepedulian tentang hal itu hanya dilakukan oleh beberapa masyarakat yang berhubungan dengan gua, yaitu pemilik, penemu, dan aparat desa. Masyarakat lainnya pun tidak bisa sepenuhnya ikut serta dalam pengelolaan, mereka hanya



dapat melihat, merasakan dan menerima manfaat adanya pariwisata *Goa Gong* ini dalam kehidupannya.

Begitu juga penjelasan dari pihak pemerintah, bahwa melibatkan masyarakat dalam kebijakan pengelolaan gua dirasa sangat sulit. Pemerintah menyadari bahwa *Goa Gong* dulu ditemukan dan dijadikan obyek wisata oleh masyarakat, akan tetapi untuk sekarang ini setelah dipegang oleh pemerintah dalam pengelolannya, pemerintah masih kesulitan untuk mengatur dan merubah *mindset* masyarakat untuk dapat masuk dalam pengelolaan. Jadi, dalam pengelolaan *Goa Gong* ini sepenuhnya dipikirkan dan dibuat oleh pemerintah daerah karena pemerintah takut jika masyarakat juga terlalu dominan dalam menentukan kebijakan nantinya masyarakat akan semaunya sendiri dan merusak alur yang seharusnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai obyek wisata *Goa Gong* ini pernah dibahas sebelumnya, tetapi belum menyentuh pada peran masyarakat terutama pada keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam pengelolaan obyek wisata *Goa Gong*.

Oleh karena itu, penelitian ini sebagai penambah atau lanjutan dari penelitian terdahulu dengan merumuskan dua permasalahan yaitu, (1) bagaimana pengelolaan obyek wisata *Goa Gong*, dan (2) sejauh mana keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam pengelolaan obyek wisata *Goa Gong*.

Data lapangan menunjukkan bahwa dulu kepemilikan *Goa Gong* dimiliki oleh masyarakat Desa Bomo dan masyarakat mengelolanya secara swadaya, namun terdapat keterbatasan dalam pengelolaan yang memaksa masyarakat menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah mengelolanya sampai sekarang. Data lain menunjukkan bahwa sistem kepemilikan *Goa Gong* ini merupakan sistem sewa, karena kepemilikan gua merupakan milik perseorangan yang tidak lain adalah milik salah satu warga Desa Bomo. Kemudian dalam mengelola *Goa Gong* pemerintah menyewa gua tersebut agar *Goa Gong* tetap menjadi obyek wisata yang semua itu dilakukan dengan adanya kontrak perjanjian sewa lahan antara pemerintah dengan pemilik gua. Atas dasar kepemilikan gua tersebut, masyarakat juga ingin untuk dapat mengelolanya karena dulu *Goa Gong* ditemukan oleh mereka, tetapi realitanya masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan secara formal.



Dalam melihat tentang sejauh mana keterlibatan masyarakat Desa Bomo dalam pengelolaan *Goa Gong*, ada dua perspektif berbeda yang muncul di sini, pertama perspektif dari pemerintah daerah yang merasa sudah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan *Goa Gong* tetapi pada sektor informal yaitu berdagang dan menawarkan jasa di kawasan *Goa Gong*. Perspektif yang kedua dari masyarakat yang melihat keterlibatan itu adalah keterlibatan secara formal yaitu ikut dalam struktur pengelolaan *Goa Gong* dengan menjadi pegawai.

Meskipun demikian masyarakat tetap menyadari bahwa mereka memiliki batasan, sehingga mereka tidak bisa semaunya sendiri untuk ikut masuk dalam struktur pengelolaan obyek wisata *Goa Gong*.

## 5.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini tentunya memiliki batasan dalam pembahasannya. Penelitian ini belum menghasilkan temuan data secara menyeluruh dan masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terjawab, sehingga dari penelitian ini nantinya dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan permasalahan yang berbeda. Permasalahan yang sekiranya dapat dijadikan sebagai lanjutan dari penelitian ini yaitu mengenai pengaruh adanya obyek wisata *Goa Gong* ini terhadap kehidupan masyarakat Desa Bomo dan juga mengenai permasalahan tentang sistem bagi hasil antara penemu gua dengan pemilik gua yang nantinya dapat mengakibatkan kecemburuan masyarakat di sana, serta konflik-konflik atau permasalahan lainnya terkait dengan obyek pariwisata *Goa Gong*.

## DAFTAR PUSTAKA

Damanik, Janianton. 2005. *Kebijakan Publik dan Praksis Democratic Governance di Sektor Pariwisata*, Jurnal Volume 8 Nomor 3 Tahun 2005.

Damanik, Janianton. 2013. *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Elliot, J. 1997. *Tourism: Politics and Public Sector Management*. London: Methuen

Goerge, E. Wanda, dkk. 2009. *Rural Tourism Development: Localism and Cultural Change*.

Joko Subagyo, P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Kasmaningrum, Nendras. 2008. *Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata Goa Gong di Kabupaten Pacitan*. Surakarta: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret.

Kaspary dan Araujo. 2013. *Local Responses to Tourism Development on the North-Eastern Coast of Brazil: The Case of the Municipality of Maragogi in Alagoas State*, Jurnal Volume 9 Nomor 5 Tahun 2013

Lewis, J dan Ritchie. 2003. *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Student Researcher*. London: SAGE Publications

Milles, Mattew dan A. Mischael Hiberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press

Nawawi, Ahmad. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di Desa Kretek Parangtritis*. Jurnal Nasional Pariwisata Volume 5 Nomor 2 Tahun 2013

Prasiasa, D. P. O. 2011. *Wacana Kontemporer Pariwisata*. Jakarta: Salemba Humanika

Sudarmadji, dkk. 2013. *Ekologi Lingkungan Kawasan Karst Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish



Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA

Bandung

Timothy, Dallen J. 2003. *Arguments for Community Participation in the Tourism Development Process*. The Journal of Tourism Studies Volume 14 Nomor 2 Tahun 2003

Data Profil Desa Bomo Tahun 2013

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keperawatan

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2014

Perda Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

### **Internet**

Disbudparpora. *Visi Misi Disbudparpora Kabupaten Pacitan*.

(<http://www.pacitantourism.net/hal-profil-disbudparpora-pacitan.html>)

diakses pada tanggal 5 Maret 2016 (9.39)

*Pariwisata Diharapkan Mampu Tumbuhkembangkan Ekonomi Masyarakat*

*Pacitan*. ([www.pacitanku.com](http://www.pacitanku.com)) diakses pada tanggal 15 April 2016

(18,12)

*Pengertian Geopark*. ([www.kanal.web.id/2016/05/pengertian-geopark.html](http://www.kanal.web.id/2016/05/pengertian-geopark.html))

diakses pada tanggal 29 September 2016 (13.10)

### **Majalah**

Badan Geologi. 2015. *Geomagz (Gunung Sewu Mendunia Lagi)*, Majalah Volume

5 Nomor 4 Tahun 2015

LAMPIRAN





**LAMPIRAN 1. BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

**LAMPIRAN 1**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN**

**TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

---

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

1. Nama : Sonya Nirwana Maharani
2. NIM : 125110806111001
3. Program Studi : S1 Antropologi
4. Topik Skripsi : Pariwisata
5. Judul Skripsi : Dinamika Pengelolaan Pariwisata: Antara Kebijakan Pemerintah dan Keterlibatan Masyarakat Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan dalam Pengelolaan Obyek Wisata Goa Gong
6. Tanggal Mengajukan : 30 November 2016
7. Tanggal Selesai Skripsi : 14 Desember 2016
8. Nama Pembimbing : Aji Prasetya W. U, M.A
9. Keterangan Konsultasi :

No	Tanggal	Materi	Pembimbing	Paraf
1	16/9/2015	Pengajuan Judul Skripsi	Aji Prasetya W.U, M. A	
2	23/9/2015	Pengajuan Judul Skripsi	Aji Prasetya W.U, M. A	
3	09/10/2015	Perencanaan Penelitian	Aji Prasetya W.U, M. A	
4	16/10/2015	Observasi Tahap Pertama	Aji Prasetya W.U, M. A	
5	16/11/2015	Pengajuan Latar Belakang	Aji Prasetya W.U, M. A	
6	25/11/2015	Pengajuan Tinjauan Pustaka	Aji Prasetya W.U, M. A	
7	10/12/2015	Pengajuan Kajian Pustaka, Teori, dan Metode Penelitian	Aji Prasetya W.U, M. A	
8	18/12/2015	Revisi BAB I	Aji Prasetya W.U, M. A	
9	14/01/2016	Revisi BAB I	Aji Prasetya W.U, M. A	
10	21/01/2016	ACC BAB I	Aji Prasetya W.U, M. A	
11	28/01/2016	Seminar Proposal	Aji Prasetya W.U, M. A Siti Zurinani, M. A	
12	01/02/2016	Pemenuhan Administrasi Penelitian	Aji Prasetya W.U, M. A	
13	19/02/2016	Pengajuan Surat Ijin Penelitian	Aji Prasetya W.U, M. A	
14	Maret-Mei 2016	Penelitian Lapangan	Aji Prasetya W.U, M. A	
15	08/07/2016	Pengajuan BAB II	Aji Prasetya W.U, M. A	



16	14/07/2016	Pengajuan BAB III	Aji Prasetya W.U, M. A	
17	22/07/2016	Revisi BAB III	Aji Prasetya W.U, M. A	
18	29/07/2016	Pengajuan BAB III & BAB IV	Aji Prasetya W.U, M. A	
19	12/08/2016	Revisi BAB IV	Aji Prasetya W.U, M. A	
20	18/08/2016	Revisi BAB IV	Aji Prasetya W.U, M. A	
21	01/09/2016	Pengajuan BAB I	Aji Prasetya W.U, M. A	
22	09/09/2016	Revisi BAB I & BAB V	Aji Prasetya W.U, M. A	
23	16/09/2016	Pengajuan BAB I, II, III, IV, & V	Aji Prasetya W.U, M. A	
24	23/09/2016	Revisi BAB I, II, III, IV & V	Aji Prasetya W.U, M. A	
25	07/10/2016	Revisi BAB I, II, III, IV & V	Aji Prasetya W.U, M. A	
26	14/10/2016	Revisi BAB I, II, III, IV & V	Aji Prasetya W.U, M. A	
27	21/10/2016	ACC Seminar Hasil	Aji Prasetya W.U, M. A	
28	28/10/2016	Seminar Hasil	Aji Prasetya W.U, M. A Siti Zurinani, M. A	
29	04/11/2016	Revisi Seminar Hasil	Aji Prasetya W.U, M. A	
30	23/11/2016	Revisi Seminar Hasil dan ACC Ujian Skripsi	Aji Prasetya W.U, M. A	
31	30/11/2016	Ujian Skripsi	Aji Prasetya W.U, M. A Siti Zurinani, M. A	
32	14/12/2016	Revisi Akhir	Aji Prasetya W.U, M. A	

10. Telah dievaluasi dan diuji dengan nilai:

A

Malang, 15 Desember 2016

Mengetahui,

Ketua Program Studi Antropologi

Dosen Pembimbing I

Dr. Hipolitus K. Kewuel, M. Hum

Aji Prasetya W. U, M. A

NIK. 19670803 20011112 1 001

NIK. 20160787 1030 1 001



## LAMPIRAN 2. BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Untuk Mahasiswa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia  
Telp. (0341) 575875 Fax. (0341) 575822  
E-mail: fib\_ub@ub.ac.id http://www.fib\_ub.ac.id

### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : Rabu, 27 Januari 2016

Untuk mahasiswa :

Nama : SORAYA TURWANA MAHARANI

N I M : 125110806111001

Prodi : Antropologi

Dengan judul :

Goa Gong : Keterlibatan Masyarakat Desa Bomo Kecamatan

Punung Kabupaten Pacitan Dalam Pengelolaan Pariwisata

Yang telah dihadiri oleh :

1. Pembimbing I : Edlin Dahniar Al-Fath, MA.
2. Pembimbing II : \_\_\_\_\_
3. Peserta umum sejumlah : 2 0 orang (terlampir)

Malang,  
Pembimbing II

Pembimbing I

Edlin Dahniar Al-Fath, MA  
NIP. 87092112320051

( \_\_\_\_\_ )  
NIP. \_\_\_\_\_

Pembantu Dekan I,

Syariful Muttaqin, M.A.  
NIP. 197511012003121001

### LAMPIRAN 3. BERITA ACARA SEMINAR HASIL SKRIPSI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia  
Telp. (0341) 575875 Fax: (0341) 575822  
E-mail: fib\_ub@ub.ac.id http://www.fib.ub.ac.id

Untuk Mahasiswa

### BERITA ACARA SEMINAR HASIL SKRIPSI

Telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi Program S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada :

Hari, tanggal : JUMAT, 28 OKTOBER 2016

Untuk mahasiswa :

Nama : SONYA NIRWANA MAHARANI

N I M : 25110806111001

Prodi : ANTROPOLOGI

Dengan judul :

KETERUBATAN MASYARAKAT DESA BOMO, KECAMATAN PUNUW

KABUPATEN PACITAN DALAM DEWELCLAAAN OBYEK WISATA

GOA GONG

Yang telah dihadiri oleh :

1. Pembimbing I : ASI PRASETYA, MA
2. Pembimbing II : \_\_\_\_\_
3. Penguji : SITI ZULNANI, M.A
4. Peserta umum sejumlah : 1 | 1 orang (terlampir)

Pembimbing I

( Asi Prasetya, M.A. )  
NIP. \_\_\_\_\_

Malang, 28 OKTOBER 2016  
Pembimbing II

NIP. \_\_\_\_\_

Pembantu Dekan I,

( Syariful Muttaqin, M.A. )

NIP. 19751101 200312 1 001



## LAMPIRAN 4. SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341- 575875, Fax. +62341- 575822  
E-mail : fib\_ub@ub.ac.id - http://www.fib.ub.ac.id

Malang, 01 MAR 2016

Nomor : 0554 /UN10.12/AK/2016  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Jalan Ronggo Warsito nomor 7  
Pacitan, Jawa Timur

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, kami mohon dengan hormat agar Saudara:

Nama : Sonya Nirwana M  
NIM : 125110806111001  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : S1 Antropologi

diberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan memperoleh data pendukung berkaitan dengan usulan skripsi berjudul:

"GOA GONG: KETERLIBATAN MASYARAKAT DESA BOMO DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA"

Selanjutnya kami sampaikan bahwa data yang diperoleh akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk penelitian (terlampir).

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik ini, diucapkan terimakasih.



Prof. Ir. Ratya Anindita, M.S., Ph.D.  
NIP. 19610908 198601 1 001

Tembusan: Yth.

1. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Pacitan
2. Camat Punung
3. Kepala Desa Bomo

## LAMPIRAN 5. SURAT PERNYATAAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341- 575875, Fax. +62341- 575822  
E-mail : [fib\\_ub@ub.ac.id](mailto:fib_ub@ub.ac.id) - <http://www.fib.ub.ac.id>

### Surat Pernyataan

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sonya Nirwana M  
NIM : 125110806111001  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : S1 Antropologi

dengan ini menyatakan bahwa berkaitan dengan penyusunan skripsi Program S1 saya yang berjudul:

"GOA GONG: KETERLIBATAN MASYARAKAT DESA BOMO DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA"

akan menjaga kerahasiaan data yang saya peroleh dan jika terjadi penyalahgunaan terhadap data tersebut, saya bersedia atas ditandanya sesuai etika penelitian yang berlaku di Indonesia. Pernyataan ini saya buat atas kesadaran akan etika penelitian yang berlaku.

Tanggal pernyataan: 25 Februari 2016

Yang membuat pernyataan;



Sonya Nirwana M  
125110806111001

Mengetahui:



Prof. Ir. Ratya Anindita, M.S., Ph.D.  
NIP. 19610908 1986011 1001

Ketua Program Studi  
S1 Antropologi

Dr. Hipolitus K. Kewuel  
NIP. 19670803 200112 1 001



**LAMPIRAN 6. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN DARI BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
JL. Ronggowarsito No. 7 Telp. ( 0357 ) 881066  
PACITAN**

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR: 072/ 107 /408.45/2016

- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuandan Teknologi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
- Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang, Tanggal 01 Maret 2016, Nomor : 0554/UN10.12/AK/2016 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

**MEMBERITAHUKAN BAHWA**

- Nama : **SONYA NIRWANA MAHARANI**
- Jabatan/ Alamat : Mahasiswa/ Rt.002/Rw.002 Ngaglik Ds. Menadi Kab. Pacitan
- NIM /Telpon : 125110806111001/ 087758595550
- Untuk : Melaksanakan Penelitian dengan judul “ **GOA GONG : Keterlibatan Masyarakat Desa Bomo Dalam Pengelolaan Pariwisata** ”
- Lokasi penelitian : Goa Gong Desa Bomo Kec. Punung
- Waktu penelitian : 8 Maret s/d 8 Mei 2016
- Anggota tim peneliti : -
- Bidang penelitian : Pariwisata
- Status penelitian : Baru

**Dengan ketentuan**

1. Berkeajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/ lokasi penelitian
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat / lokasi penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Pacitan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
4. Apabila masa berlaku rekomendasi penelitian telah berakhir, dan penelitian sedang berjalan, peneliti harus segera mengajukan perpanjangan waktu dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa Pemegang Surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pacitan, 08 Maret 2016

An. KEPALA BAKESBANGPOL  
KABUPATEN PACITAN  
Sekretaris

**Drs. THEODORUS DURU, M.Si**

Pembina Tingkat I  
Nip. 19590831 198612 1 002

**Tembusan :**

- Yth. 1. Bapak Bupati Pacitan  
2. Dandim 0801 Pacitan  
3. Kapolres Pacitan  
4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pacitan  
5. Sdr. Kepala Balitbang dan Statistik Kab. Pacitan  
6. Sdr. Kepala DISBUDPARPORA Kab. Pacitan  
7. Sdr. Camat Punung  
8. Sdr. Kepala Desa Bomo Kec. Punung  
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan